



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI, KEPALA BPH MIGAS, DIRUT
PT PERTAMINA (PERSERO)**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	RDP
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Selasa, 29 Maret 2022
Waktu	:	Pukul 14.10 WIB s.d 17.50 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	:	H. Eddy Soeparno, S.H., M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPRRI
Acara	:	1. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga dan penyaluran BBM di dalam negeri; 2. Mekanisme distribusi kuota dalam mengatasi kelangkaan solar; 3. Kenaikan harga LPG nonsubsidi; dan 4. Lain-lain.
Hadir	:	36 orang anggota hadir dari 53 orang anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Bambang Haryadi, S.E., /F-P.GERINDRA/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI
3. H. Eddy Soeparno, S.H.,M.H./F-PAN/ Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

- 10 orang anggota dari 11 anggota
1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
 2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.

3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Paramitha Widya Kusuma, S.E.
8. Ismail Thomas, S.H., M.Si.
9. Novri Ompusunggu
10. Herman Hery

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

4 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. H. Hasnuryadi Sulaiman, S.E., M.A.B.
3. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
4. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

5 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. R. Wulansari
3. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen
5. H. Iwan Kurniawan, S.H.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Arkanata Akram, ST., B.E. (Hons), M.Eng.Sc.
2. Rian Firmansyah, S.Pd.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.
2. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M.
3. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D. (Dirjen Migas Kementerian ESDMRI)
2. Erika Retnowati (Kepala BPH Migas)
3. Nicke Widyawati (Dirut PT Pertamina Persero)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./WAKIL KETUA KOMISI VII DPRRI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam sehat bagi kita semua.
Selamat sore Ibu/Bapak sekalian.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPRRI,
Yang kami hormati Dirjen Migas Kementerian ESDMRI,
Yang kami hormati kepala BPH Migas,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Pertamina Persero beserta seluruh jajaran terkait,
Serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berkumpul melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPRRI serta Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Persero beserta jajarannya yang telah hadir dalam acara Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI, baik secara fisik maupun *virtual*.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal Rapat Komisi VII DPRRI pada Masa Persidangan ke-4 Tahun 2021-2022. Pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan agenda:

- a. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga dan penyaluran BBM di dalam negeri;
- b. Mekanisme distribusi kuota dalam mengatasi kelangkaan solar;

- c. Kenaikan harga LPG nonsubsidi; dan
- d. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 24 anggota dari 8 fraksi dari 9 yang ada. Dengan demikian, kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat dengar pendapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)

Sebelum lanjutan rapat ini, kami menyatakan persetujuan Ibu/Bapak anggota Komisi VII DPRRI bahwa rapat ini selesai pada pukul 16.30 WIB atau kurang lebih 2 jam setelah rapat dibuka dan apabila diperlukan bisa diperpanjang dengan kesepakatan bersama, setuju?.

(RAPAT : SETUJU)

Ibu/Bapak yang kami hormati,

Krisis geopolitik di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina dan Timur Tengah menjadi faktor utama pergerakan harga *crude oil* di pasar global. Dalam jangka pendek keengganan Arab Saudi dan Anggota OPEC lainnya untuk meningkatkan produksi dipastikan akan memicu eskalasi, eskalasi harga *crude oil* pada level yang lebih tinggi di atas 100 dolar per barel. Dampak negatif pergerakan harga minyak bumi di pasar global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia sebagai *net importer*, tetapi dirasakan oleh negara-negara lainnya bahkan negara-negara maju yang tergabung di dalam Uni Eropa.

Dalam kondisi seperti ini maka defisit neraca transaksi berjalan sektor energi sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018 menjadi sebuah keniscayaan. Mengingat 50% lebih dari *crude oil* untuk memenuhi kebutuhan kilang di dalam negeri dilakukan melalui impor. Karena itu sangat wajar apabila BBM, LPG dan solar terafiliasi dengan pergerakan harga *crude oil* di pasar global. Persoalan lainnya adalah penerapan kebijakan diskriminasi harga pada BBM, LPG dan solar. Hal ini akan mendorong timbulnya *rent seeking* dan *illegal trading* akibat adanya disparitas harga yang lebar.

Untuk itu melalui rapat dengar pendapat ini Komisi VII DPRRI perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai kuota dan sistem

distribusi BBM agar diperoleh solusi yang optimal yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT Pertamina Persero untuk menyampaikan pemaparannya.

Namun sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota Komisi VII DPRRI yang baru hadir juga dalam kesempatan ini Bapak Drs. Hendrik H. Sitompul, Fraksi Partai Demokrat Dapil Sumut 1, silakan.

Baik, kami persilakan Pak Dirjen, Kepala BPH Migas dan Ibu Dirut untuk kemudian menyampaikan pemaparannya.

Silakan Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDMRI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih.

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI, Kepala BPH Migas serta jajarannya, Direktur Utama PT Pertamina Persero beserta jajarannya, Para pejabat di lingkungan Ditjen Migas, dan Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Selamat sore,
Salam sejahtera,
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanat konstitusi yaitu Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI, dengan agenda:

1. Dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap harga dan penyaluran BBM di dalam negeri;
2. Kenaikan harga LPG nonsubsidi.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Dalam 3 bulan terakhir harga minyak berfluktuasi sebagaimana dalam *slide*, rata-rata ICP sebesar 98,28 US dolar per barel. Beberapa pemicu pergerakan harga minyak adalah belum adanya kemajuan upaya damai dalam konflik perang Rusia-Ukraina, serang terhadap fasilitas minyak mentah Arab Saudi, gangguan ekspor minyak mentah Rusia dan Kazakhstan melalui pipa CPC dan potensi pelepasan cadangan komersial minyak mentah Amerika Serikat.

Sementara itu realisasi ICP sampai dengan 25 Maret 2022 adalah 114,68 US dolar per barel di tengah nilai tukar rupiah yang stabil pada kisaran

Rp14.300,- per dolar AS. Kemudian *outlook* harga minyak mentah dan gas bumi tentunya pasti akan dipengaruhi oleh kondisi global. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh FGE harga minyak mentah saat ini belum masuk pada puncak gangguan, yang diperkirakan baru akan terjadi di bulan April akibat dampak dari larangan impor minyak dari Rusia oleh beberapa negara. Diperkirakan *dated brent* akan terdorong sampai dengan 130 US dolar per barel. Demikian juga halnya dengan harga gas yang cenderung naik karena berkurangnya suplai gas bumi. Perbaikan harga gas maupun minyak bumi masih sangat dipengaruhi oleh upaya perdamaian pada krisis Rusia-Ukraina. Tingginya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap harga BBM dalam negeri seperti terlihat dalam *slide*.

Realisasi MOPS RON 92 rata-rata pada Maret 2022 adalah 128 US dolar per barel atau naik 63% dari rata-rata tahun 2021 sebesar 78,48 per USD barel. Sedangkan realisasi MOPS CN 48 rata-rata pada Maret 2022 adalah 136,04 USD per barel atau naik 79% dari rata-rata tahun 2021 sebesar 75,86 USD per barel. Walaupun demikian pemerintah masih dapat menjaga harga BBM dalam negeri yaitu HJE untuk JBKP pertalite dan JPT solar ditetapkan masing-masing sebesar Rp7.650,- per liter dan Rp5.150,- per liter.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Demi menjaga ketersediaan bahan bakar minyak di tahun 2022 kami telah melakukan simulasi penawaran JPT solar retail dan JBKP pertalite. Skenario penyaluran JPT solar sektor retail adalah sebagai berikut:

1. Kuota JPT minyak solar tahun 2022 sebesar 15,1 juta kilo liter atau turun 4,43% dari kuota tahun 2021, sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2%;
2. Realisasi penyaluran JPT solar sampai dengan Februari 2022 sebesar 2,49 juta kilo liter atau mengalami *over* sebesar 10% terhadap kuota *year to date* Februari 2022; dan
3. Diestimasikan pada akhir tahun akan mengalami *over* kuota sebesar 14% atau 16,002 juta kilo liter apabila pengendalian tidak berhasil.

Sementara untuk skenario penyaluran pertalite dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bensin RON 90 ditetapkan sebagai JBKP berdasarkan atas Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang JBKP.
2. Kuota JBKP bensin RON 90 atau jenis pertalite pada tahun ini ditetapkan sebesar 23,05 juta kilo liter.
3. Realisasi penyaluran JBKP pertalite sampai dengan bulan Februari 2022 adalah 4,258 juta kilo liter atau melebihi kuota Februari secara *year to date*.
4. Jika diestimasikan melalui normal skenario maka di akhir 2022 akan terjadi *over* kuota sebesar 15% dari kuota normal.

Selanjutnya, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Dalam upaya menjaga pasokan BBM dan LPG dalam negeri, khususnya menjelang datangnya Ramadhan secara umum berdasarkan kondisi stok dan *coverage days* kondisi penyaluran BBM dan LPG berada di level aman. Kondisi stok BBM dan *coverage days* BBM Nasional PT Pertamina (Persero) sebagai berikut, seperti tampak pada *slide*:

- Bensin RON 88: 344.347 kilo liter dengan *coverage days* 26,3 hari;
- Bensin RON 90: 1.157.229 kilo liter atau 15,7 hari *coverage days*;
- Bensin RON 92: 927.137 kilo liter atau 25,9 hari;
- Solar CN 48: 1.900.922 kilo liter atau 23,2 hari;
- Bensin RON \geq 95: 47.969 kilo liter atau 56,6 hari;
- Solar CN 53: 29.212 kilo liter atau 23,4 hari;
- Kerosene: 73.536 kilo liter atau 54,5 hari;
- Avtur: 306.960 kilo liter atau 39,1 hari.

Kondisi stok LPG sebesar 382.818 matrik ton, dengan *coverage days* LPG mencapai 16,4 hari.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat,

Selanjutnya, dalam upaya pengendalian pelayanan BBM jenis solar JPT, pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis di antaranya:

1. Telah terbitnya Kepmen ESDM No 45.K/HK.02/SJN.H/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM.
2. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan bersama antara Ditjen Migas, Tim BPH Migas dan Pertamina di beberapa daerah yang terjadi antrean kelangkaan solar
3. Melakukan *monitoring* stok bahan bakar migas melalui pemantauan langsung *ke command center* atau laporan harian dari Pertamina ke Ditjen Migas.
4. Meminta Pertamina melakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang untuk pengamanan penyaluran solar JBT.
5. Meminta Pertamina agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat,

Proporsi *volume* LPG non-PSO sektor retail relatif stagnan sebesar 7% sampai 8%, *volume* LPG Non-PSO sektor retail menurun sejak tahun 2019 kurang lebih minus 4%, tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan *volume* LPG tabung 3 Kg atau PSO yang terus meningkat setiap tahunnya. Disparitas harga LPG PSO dan LPG non-PSO yang cukup tinggi menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan LPG PSO. Terdapat selisih sebesar Rp11.333,- antara LPG non-PSO dengan HJE tabung 3 kg. Alasan inilah yang mengakibatkan masyarakat memilih menggunakan LPG tabung 3 kg.

Selanjutnya, setiap tahun telah ditentukan kuota LPG PSO per kabupaten kota dalam rangka mempermudah *monitoring* penyaluran LPG PSO telah dibedakan *plastic wrap* tabung antar kabupaten/kota. Segmentasi

pengguna untuk LPG PSO dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu rumah tangga kurang mampu, usaha mikro, nelayan sasaran, petani sasaran. Sedangkan pengguna LPG non PSO adalah rumah tangga mampu, restoran, hotel dan *laundry*. Untuk penggunaan LPG 3 kg Ditjen Migas telah mengirimkan Surat Nomor B-2461 Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022 ke seluruh gubernur di 29 provinsi yang telah dikonversi, tembusan ke Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Patra Niaga.

Harga minyak dunia yang terus berkembang tentunya akan memberikan tekanan pada APBN untuk subsidi maupun kompensasi JPT, JBKP dan LPG tabung 3 kg. Berdasarkan analisis sensitivitas untuk setiap kenaikan ICP sebesar 1 USD per barel berpotensi meningkatkan subsidi LPG tabung 3 kg sebesar Rp1,48 triliun. Subsidi minyak tanah sebesar Rp50 miliar, kompensasi JPT solar sebesar Rp1,51 triliun dan kompensasi JBKP pertalite sebesar Rp2,31 triliun. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan ini adalah kurs Rp14.450,- dan PPN 11% per 20 April 2022. Di tengah tekanan yang kuat pada APBN Pemerintah berkomitmen untuk mengamankan pasokan BBM dan LPG masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati,

Demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan selanjutnya kami mengharapkan masukan dari Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Dirjen.

Kami lanjutkan dengan Kepala BPH Migas, silakan.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI,
Yang saya hormati Bapak Dirjen Migas Kementerian ESDM,
Ibu Dirut PT Pertamina Persero, dan
Bapak Ibu sekalian.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPRRI dalam keadaan sehat.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan mungkin di masyarakat banyak bertanya-tanya, apakah antrian-antrian yang terjadi di SPBU itu dikarenakan adanya kelangkaan ataupun karena stok yang kurang. Di sini sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen Migas bahwa stok BBM kita dalam kondisi aman dan ini berdasarkan pemantauan kami atas stok yang dilaporkan oleh Pertamina. Jadi, kalau secara umum itu stok BBM Pertamina itu mencukupi untuk 21 hari dan untuk beberapa jenis BBM di sini bisa kita lihat, untuk solar CN 48 itu stoknya adalah 1,9 juta KL liter dengan ketahanan stok 23,27. Kemudian untuk pertalite itu stoknya 1,1 juta KL dengan ketahanan stok 15,7 hari. Kemudian BBM Pertamina itu adalah 927.000 KL dengan ketahanan stok 25,99 hari dan BBM Pertamina dex atau CN 53 stoknya adalah 29.000 dengan ketahanan stok 23,41 hari. Jadi, kalau dari data tersebut kita bisa melihat bahwa stok BBM saat ini cukup dan aman.

Kemudian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana penyaluran JPT atau jenis minyak solar bersubsidi itu mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Jadi, kalau kita lihat di sini *volume* realisasi tertinggi adalah pada tahun 2019, di mana pada tahun ini ada agenda pemilihan umum. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi minyak solar menurun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Nah kemudian pada tahun 2021 realisasi minyak solar mulai mengalami peningkatan kembali sejak bulan September 2021 dikarenakan mulai meredanya pandemi dan aktivitas masyarakat mulai meningkat. Jadi, yang semula pemerintah memperkirakan pandemi itu mungkin akan berakhir di bulan Desember, ternyata *alhamdulillah* lebih cepat *recovery*-nya sejak bulan September kegiatan sudah mulai menggeliat dan sesungguhnya konsumsi BBM pada saat itu di akhir tahun 2021 itu kurang lebih sudah sama dengan kondisi normal di tahun 2019.

Nah, pada 2022 ini sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 tercatat terealisasi *volume* penyaluran minyak solar telah mencapai 3,7 juta KL atau sebesar 25,14% dari kuota yang telah ditetapkan.

Bapak/Ibu sekalian,

Jika kita lihat lebih rinci lagi bagaimana penyaluran JPT atau minyak solar di Pertamina dan di PT AKR Corporindo pada tahun 2022, kita lihat di sini pada garis yang berwarna kuning itu adalah kuota. Sedangkan realisasi kita lihat di garis yang berwarna merah itu adalah realisasi penyaluran Pertamina dan yang biru itu realisasi secara total. Jadi, kalau kita lihat di situ kelihatan bahwa realisasi dari penyaluran BBM di bulan Januari, Februari dan Maret itu sudah melampaui kuota yang ada, sudah di atas kuota dan secara perhitungan di bulan Januari itu *over* kuota sudah mencapai 10% dan di tanggal 27 Maret

itu agak sedikit mengalami penurunan. Kalau kita gabungkan antara realisasi Pertamina dengan realisasi AKR sekitar angka perhitungan kami sekitar 8,5%. Artinya bahwa di 3 bulan pertama atau di triwulan pertama ini kita sudah melihat adanya *over* kuota dan ini apabila kegiatan ekonomi akan terus meningkat itu kemungkinan besar memang kuota BBM yang sudah ditetapkan sebesar 15,1 juta KL mungkin tidak akan mencukupi sampai dengan akhir tahun gitu.

Bapak/Ibu sekalian,

Telah disampaikan tadi bahwa terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan juga konsumsi BBM sejak September 2021. Nah, kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan dari konsumsi BBM ini. Yang pertama, berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Februari 2022 bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2022 ini diperkirakan berada pada kisaran 4,5 sampai 5,2% suatu angka yang cukup tinggi dan hal ini akan menyebabkan peningkatan kegiatan perekonomian nasional yang berimplikasi kepada sektor industri dan konsumsi, serta berdampak pada peningkatan arus barang, yaitu pada logistik dan juga transportasi.

Kemudian, yang kedua adalah *recovery* pasca pandemi yang lebih cepat dari perkiraan. Jadi, sejak triwulan IV 2021 yang pada saat itu level PPKM sudah diturunkan menjadi level I terjadi konsumsi JBT dan trend konsumsinya terjadi pada saat ini, artinya terus meningkat dan pada saat bulan Maret ini juga *demand* kita lihat masih tinggi.

Kemudian yang ketiga, harga komoditas yang meningkat pada beberapa komoditas seperti batu bara, nikel, emas, kelapa sawit yang peningkatan harga komoditas ini juga berdampak pada kegiatan pengangkutan hasil-hasil tambang tersebut yang tentunya juga akan menambah konsumsi daripada BBM dan juga, kemungkinan juga beberapa apa namanya dari perkebunan ataupun pertambangan yang sesuai.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, Bu Kepala BPH Migas.

Di sini kan menyampaikan 4,5 ke 5,2% perkiraan pertumbuhan ekonomi, penyebab peningkatan *demand* BBM. Seharusnya dikasih tahu waktu membuat asumsi kuota BBM itu berapa persen pertumbuhannya. Seharusnya datanya lengkap Bu, sehingga publik tahu, enggak ada di sini dong. Ini kan realitas, jadi waktu kuota itu dibuat asumsi pertumbuhan ekonominya berapa, supaya publik tahu, berapa sebenarnya pertumbuhan yang meningkat di luar perkiraan waktu saat membuat kuota, sehingga percepatan *demand* itu bisa dilihat publik juga. Itu maksud saya. Jadi, harus lengkap lain kali Bu Kepala BPH Migas.

Terima kasih, Pak Ketua.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Terima kasih Pak, baik nanti kami lengkapi Pak.

Kemudian izin kami lanjutkan. Tadi dari harga komoditas yang meningkat di beberapa komoditas yaitu batu bara, nikel, emas dan kelapa sawit itu juga mengakibatkan adanya peningkatan kebutuhan atas konsumsi BBM.

Kemudian juga yang keempat adalah dengan makin melebarnya disparitas harga antara JPT solar dengan JPU solar, artinya antara yang bersubsidi dengan yang nonsubsidi. Melebarnya disparitas harga tersebut menyebabkan pergeseran konsumen yang tadinya mengkonsumsi JPU solar, artinya solar yang nonsubsidi ke JPT solar atau kepada solar yang bersubsidi.

Yang kedua adalah adanya potensi penyalahgunaan JPT, jadi di beberapa tempat kami menemukan memang adanya penimbunan, kemudian adanya pengoplosan gitu ya atas JPT solar ini.

Bapak/Ibu sekalian,

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sedikit.

Coba Bu sampaikan tadi penimbunan yang Ibu temukan itu apa aja, namanya siapa saja di sini. Jadi, jangan Ibu buat nggak jelas gini, tapi harus Ibu jelaskan siapa yang melakukan itu.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya nanti di *slide* terakhir ada kami sampaikan beberapa hasil pengawasan kami, Pak.

Kemudian di *slide* berikutnya, tentu saja kami melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan untuk mengamankan penyaluran BBM bersubsidi ini. Untuk langkah-langkah pengendalian kami mempunyai beberapa aturan, yang pertama tentu saja pengaturan kuota konsumen pengguna. Itu sesuai dengan lampiran Perpres 191 Tahun 2014, kemudian kami juga mempunyai pengaturan *volume* penyaluran JPT solar untuk kendaraan angkutan darat. Jadi, itu sesuai dengan SK BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran JPT solar untuk Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor, untuk Angkutan Orang atau Barang. Kemudian juga kami mempunyai pengaturan untuk penerbitan surat rekomendasi untuk pemilihan JPT solar untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019.

Nah ini, saat ini kami sedang mengevaluasi aturan-aturan ini yang kami rasa perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan ke depannya. Jadi, ini sedang dalam proses untuk dilakukan revisi. Sedangkan di dalam kegiatan pengawasan, kami sudah melakukan pengawasan ke lapangan

secara rutin yang kami lakukan antara lain dalam rangka verifikasi *volume* yang dilakukan setiap bulan. Kemudian, juga kunjungan ke lapangan itu setiap minggu kami lakukan secara *sampling*. Kemudian, juga pemanfaatan IT tentunya dengan adanya digitalisasi *nozzle* yang kami tugaskan kepada badan usaha penugasan. Kemudian, kami juga membangun aplikasi yang kami beri nama SILVIA yaitu berupa sistem informasi pelaporan dan pengawasan pendistribusian BBM. Kemudian, juga kami melakukan kerja sama pengawasan dengan aparat penegak hukum. Jadi, kami mempunyai perjanjian kerja sama dengan Polri, selain itu juga kami sudah juga melakukan kerja sama dengan TNI, dengan bais TNI juga kami punya kerja sama. Kemudian juga pengawasan terpadu dalam tim gugus tugas pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM Kementerian ESDM yang tadi sudah disampaikan Pak Dirjen. Dan juga kami melakukan pengawasan bersama dengan pemda-pemda.

Berikutnya kami tampilkan di sini beberapa contoh dari hasil pengawasan yang kami lakukan. Jadi, yang di atas itu adalah di tanggal 11 Maret kemarin kami melakukan penangkapan pelaku untuk solar oplosan di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Saat itu kami menemukan barang bukti sebanyak 108 ton yang berada di gudangnya yang siap untuk didistribusikan. Itu merupakan solar oplosan dari apa namanya minyak sulingan gitu dari daerah Sekayu dengan biosolar.

Kemudian, kami juga menemukan di Kabupaten Indramayu itu pembelian solar dengan menggunakan jerigen-jerigen yang kemudian itu dibawa ke suatu tempat penimbunan di Eretan di daerah Eretan. Itu juga kami temukan di sana.

Kemudian, berikutnya lagi di *slide* berikutnya, kami juga menemukan di Sumedang itu berdasarkan, kita selalu ngecek CCTV yang ada di SPBU itu ada pembelian dengan mobil yang tangkinya dimodifikasi gitu ya. Jadi, modifikasi tangki itu terjadi di beberapa daerah. Ada di Sumedang. Kemudian, kami juga menemukan juga di Purwakarta begitu ya, kemudian juga dari hasil pengawasan juga kami melihat banyak truk-truk tambang dan perkebunan gitu yang ikut mengantri di SPBU-SPBU. Kebanyakan memang di daerah pertambangan apa namanya antrian terbanyak dari truk-truk tambang tersebut dan juga dari perkebunan.

Demikian yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPH dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penyaluran distribusi BBM, dengan demikian kami kembalikan kembali kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kami persilakan Ibu Dirut Pertamina untuk melanjutkan.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Baik.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan Komisi VII DPRRI serta Bapak/Ibu Anggota DPR Komisi VII, serta

Pak Dirjen,

Ibu Kepala BPH, dan

Bapak/Ibu semua yang hadir pada kesempatan RDP siang hari ini.

Tadi Pak Dirjen Migas dan Ibu Kepala BPH Migas sudah menjelaskan banyak hal. Barangkali, kami hanya ingin menambahkan saja. Yang pertama adalah bagaimana dampak dari kondisi pasar global, secara umum tadi Pak Dirjen sudah sampaikan. Namun, kami ingin mendetailkan dari sisi komoditas yang berpengaruh terhadap produk dari Pertamina. Jadi, kalau kita lihat *oil* produk pengaruhnya ke Pertamina satu adalah *crude*, yang kedua adalah produknya itu sendiri BBM karena kita akan mengimpor *crude* dan juga mengimpor produk atau BBM. Dengan asumsi harga di APBN, harga minyak dunia itu 65 yang kemudian ICP-nya adalah 63, faktanya hari ini, ini harga minyak dunia sudah 119 dolar per barel dan ICP kita 114 dolar per barel. Dan ini dampaknya tentu karena adanya situasi geopolitik Rusia-Ukraina ini ada *supply* yang selama ini dilakukan dari Rusia ini terkena sanksi. Sehingga, terjadilah kekurangan *supply* yang menyebabkan harga kemudian makin meningkat. Itu dari sisi *crude*.

Yang kedua adalah untuk *gasoline*. *Gasoline* ini *supply crude oil* dari Rusia ini yang selama ini cukup besar untuk mensuplai ke Amerika. Nah, karena di-*stop*-nya itu maka produksi *gasoline* dari Amerika pun menurun. Sehingga, mencari cargo lain tetapi kembali lagi ini *supply* sangat terdampak. Di sisi lain, *demand* meningkat karena kaitannya dengan suplai gas yang berkurang. Gas oil juga demikian. Jadi, sebetulnya kalau dilihat *supply gas oil* ke barat dari Rusia itu sekitar 50%. Jadi, bayangkan 50% itu terhenti padahal di sisi lain untuk bisa mengganti pasokan gas yang juga terkendala ke Eropa ini kemudian mereka harus memberikan gas oil dalam jumlah banyak. Sehingga kalau kita lihat stok di Singapura yang selama ini selalu untuk *spot* ..(*suara tidak jelas*).. di Singapura ini sudah terendah dalam 5 tahun terakhir. Jadi, bukan hanya harganya yang naik tinggi, tetapi juga *availability*-nya. Jadi, kalau kita sebut *crack spade*. Jadi, antara *crude* dengan harga BBM yang selama ini kan sekitar 4 sampai 8 dolar, ini di awal Maret kemarin itu *crack spade*-nya itu mencapai 51 dolar. Jadi, luar biasa ini harganya.

Yang terakhir adalah LPG. LPG di dalam APBN itu kita asumsikan harganya adalah 535 dolar per metrik ton. Hari ini sudah 910. Jadi, angkanya juga sudah luar biasa besar dan dari sisi lain. Dari sisi *supply* juga berkurang *volume*-nya karena kembali dengan di-*stop*-nya *supply* atau berkurangnya suplai gas dari Rusia ini kemudian mencari *source* lain.

Situasi inilah yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Pertamina dan tentu menjadi tantangan tersendiri karena di sisi lain kita Pertamina tetap menjaga ketahanan stok nasional. *Next slide*.

Ini adalah kondisi stok. Jadi, walaupun kondisi sangat berat yang tadi kami sampaikan, Pertamina tetap menjaga yang namanya ketahanan stok dari sisi stok operasi sebetulnya. Ini adalah stok operasi Pertamina dengan sistem distribusi seperti ini, maka stok operasi yang harus dijaga agar aman itu adalah sekitar 21 hari. Tadi Bu Kepala dan Pak Dirjen Migas sudah menyampaikan data-datanya, kalau yang sekarang yang ramai dibahas adalah solar, sebetulnya stoknya adalah 23,27 hari. Jadi, malah lebih ya kalau kita tetapkan 21 hari.

Demikian juga produk-produk yang lain. Jadi, stok dalam kondisi aman. Masalah *supply*, walaupun tadi kondisi berat dan untuk menjaga stok ini perlu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan, sedikit.

Bu, coba tolong sampaikan berapa sih per bulan kebutuhan solar subsidi ini.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Pak, kalau boleh nanti ada data ininya boleh di *slide* berikutnya ada kami sampaikan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ada ya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Ada, jadi untuk menjaga stok 21 hari ini, Pertamina kemudian ada harus menaruh 21 hari itu senilai USD 6 miliar. Jadi, angka yang sangat besar bagi *cash flow* kita untuk menjaga ketahanan *supply*. *Supply* ini, stok ini adalah dari stok kita BBM. Kemudian, stok di kilang dan juga kemudian stok yang intransit yang dalam kapal ..(*suara tidak jelas*)...

Kemudian, kita masuk ke soal subsidi yang spesifik tadi diminta. Dari sisi kita melihatnya begini, kondisi terjadinya isu kelangkaan, antrian itu kita harus lihat dari 2 sisi, dari *supply side* dan dari *demand side*. Dari *supply side* kuota tahun 2022 itu lebih rendah 4,5% dibanding realisasi 2021. Jadi, dari sisi *supply side* itu memang lebih rendah. Kita kemudian tadi banyak membahas dari *demand side*, *demand side* ada faktor tadi..(*suara tidak jelas*..) ada harga komoditas meningkat dan kemudian kemungkinan terjadinya kecurangan. Jadi, ini kena dua-duanya gitu ya dan juga dari sisi kan disparitas harganya kan makin tinggi. Jadi, *supply side and demand side* ini kita sehingga gap-nya menjadi sangat terasa sekarang.

Nah, kami memprediksi sektor retail kalau dilihat dari kuota tahun 2022 adalah 14 juta KL. Ini kita prediksi kalau dengan realisasi seperti ini, akhir tahun ini akan meningkat 14% menjadi 16 juta dan untuk yang industri itu adalah 900. Jadi, kita perkirakan ada kenaikan dari 14, dari 15 juta menjadi 17 juta untuk solar subsidi.

Disparitas harga memang sangat besar. Jadi, sekarang ini setiap orang membeli per liter solar subsidi negara itu mensubsidi Rp7.800,-. Jadi, nilai subsidiya lebih mahal dibanding harga jualnya. Jadi, itulah mungkin ini perlu juga ini edukasi sosialisasi ke masyarakat untuk setiap pembelian yang ngocor itu setiap itu, itu Rp7.800,- negara harus bayar. Sehingga sangat penting kita menjaga dari sisi *demand side* agar tidak terjadi subsidi yang tidak tepat sasaran.

Nah, ini tadi kalau kita lihat Bapak/Ibu, hari ini sebetulnya kuota realisasi penjualan yang kita sampaikan kepada masyarakat ini sudah lebih sudah *over* kuota 10%. *Next slide*.

Per regional kami sudah buat di sini kuotanya kemudian sampai dengan Februari. Jadi, 2 bulan ya Pak Nasir, ini angkanya seperti ini untuk masing-masing regional. Sehingga secara total, ini ada peningkatan 10%. Walaupun, sebetulnya secara aturan kami tidak boleh *over* kuota tetapi dengan mempertimbangkan peningkatan mobilitas dan logistik bagi masyarakat apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, maka kita menaikkan dan ini secara rata-rata ya ada daerah-daerah yang peningkatannya sampai 75%. Jadi, kami cek betul data-data untuk masing-masing kabupaten, provinsi dan ini adalah data secara umum, data seperti ini.

Nah, apa yang kami lakukan agar terjadi kelangkaan ataupun antrian gitu ya karena secara stok sebetulnya cukup. Jadi, ya memang kami kemudian dengan pemerintah bersepakat kita berikan dulu relaksasi. Jadi, untuk daerah-daerah yang realisasinya lebih dari kuota ini tetap kita *supply*. Itu dari sisi *supply side*-nya supaya tidak ada isu-isu kelangkaan. Namun demikian, dari sisi *demand side*, kami melakukan pengendalian. Tentu bersama dengan BPH Migas karena sebagai regulator dan melibatkan aparat, aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penyaluran ini tepat sasaran dan juga tentu melakukan tindakan oleh APH. Selain itu, juga kami melakukan koordinasi dengan pemda dan ada beberapa dari pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan regulasinya mengenai pengaturan ini di masing-masing daerah. Dari sisi kami, tentu kami akan tetap menjaga juga yang BBM atau solar nonsubsidi karena ketika mereka kemudian tidak harus *shifting* ke nonsubsidi ini pun harus tersedia. Jadi, kami pastikan itu akan kami lakukan.

Slide berikutnya adalah dukungan. Tentu kami kemudian memerlukan ya suatu regulasi, hari ini ada Pak, Perpres 191 Tahun 2014 tentang siapakah yang berhak mendapatkan solar subsidi. Barangkali kalau ada yang lebih detail lagi agar ini menjadi dasar penegakan hukum di lapangan karena waktu menurunkan 5% itu dibanding tahun lalu, ini kan pasti ada satu asumsi gitu ya. Nah, ini kami mungkin dan Ibu Erika ini juga sudah menyiapkan regulasi

tersebut nanti barangkali kita harus sosialisasikan dulu kepada masyarakat. Di sisi lain, kami melihat begini juga Pak, untuk terkait dengan angkutan barang industri kan biasanya ini di-*outsourc*-kan ke transporter. Nah, di dalam kontrak antara industri besar dengan transporter ini kan seharusnya menggunakan harganya adalah harga BBM nonsubsidi. Tetapi, seringkali yang terjadi adalah di-*tender*-kan murah-murahan. Akhirnya apa? Akhirnya ya supaya menang, murah, mereka kemudian menggunakan BBM yang subsidi.

Nah, ini yang perlu ada standarisasi gitu ya mengenai transporter ini karena hari ini kami agak sulit membedakan, apakah dia mengangkut barang dari industri besar ataukah dari perkebunan rakyat. Apalagi kalau barangnya kosong, kita tidak tahu ini ngangkut apa truk ini, kalau barangnya ada oh itu sawit, oh itu batu bara tapi kalau datangnya dalam kondisi kosong kami agak sulit juga kemudian membedakan mana yang berhak dan tidak berhak.

Yang nomor 3 ini sebetulnya begini, mekanisme hari ini untuk solar itu ada subsidi tetap. Subsidi tetapnya itu adalah Rp500,- padahal tadi selisihnya Rp7.800,- nah sisanya itu Rp7.300,- dalam bentuk kompensasi yang kemudian dari sisi penetapan harga angkanya nanti dan juga penggantinya ini berbeda, perlu waktu. Ini yang kemudian menggerus *cashflow* Pertamina. Oleh karena itu, akan lebih baik agar ada *sustainability* dalam hal ketahanan energi ini mekanismenya mungkin perlu di-*review* ulang yang tidak memberatkan *cashflow* karena angkanya besar.

Yang berikutnya adalah kuota. Mungkin perlu juga dikaji kemungkinan untuk me-*review* kembali kuota ini dengan melihat *real demand* yang sampai dengan bulan ini nanti untuk kita prediksi karena pertumbuhan kita sudah merasakan jalanan sudah mulai macet, gitu ya. Jadi, itu mungkin butuh dukungan juga dan selain itu kami ada satu yang disebutnya *tools* yang bisa juga digunakan adalah menggunakan MyPertamina untuk pembayaran dalam pembelian solar subsidi. Sehingga, nanti kita bisa dapatkan data-datanya dan kita pastikan gitu ya bahwa pembeli ini memang pihak yang berhak. Ini yang juga nanti mohon dukungan dari Bapak/Ibu dan juga dari BPH Migas dan Dirjen Migas.

Agenda terakhir adalah mengenai kenaikan LPG nonsubsidi. Secara proporsi ini sekarang malah sudah hanya bukan lagi, bukan lagi 8% tapi sekarang hanya tinggal 6,5% porsi LPG non-PSO di dalam total penjualan LPG. Jadi, sudah sangat kecil sekali dan secara aturan memang ini menyesuaikan formula, menyesuaikan harga CP Aramco. Dengan CP Aramco yang kita asumsikan awalnya adalah 535 dan sekarang naik menjadi 910, secara regulasi ini dapat disesuaikan. Jadi, bisa naik-turun. Nanti turun harganya kita turunkan lagi, itulah mekanisme yang sesuai regulasi.

Jadi, yang kami sudah sesuaikan 2 kali, tanggal 25 Desember dan juga tanggal 27 Februari adalah untuk yang porsi yang hanya 6,5% ini, untuk yang non-PSO untuk rumah tangga yang mampu.

Jadi, itu Bapak/Ibu yang dapat kami sampaikan untuk melengkapi tadi paparan dari Bapak Dirjen Migas dan Ibu Kepala BPH Migas.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen, Ibu Kepala BPH Migas dan Ibu Dirut Pertamina.

Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu/Bapak Anggota Komisi VII untuk bisa melakukan pendalaman, menyampaikan pertanyaan maupun pandangan-pandangannya.

Kami persilakan rekan-rekan untuk bisa bertanya dengan maksimal 5 menit pertanyaan dan kami persilahkan dimulai dari Fraksi PDIP Perjuangan.

Silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik.

Terima kasih.

Pak Pimpinan Pak Eddy, Pak Sugeng dan seluruh rekan-rekan Komisi VII yang saya hormati,

Para pimpinan dari masing-masing institusi migas, ada Ibu Dirut Pertamina dan jajaran, Pak Dirjen Migas dari Kementerian ESDM, kemudian Kepala BPH Migas Ibu Erika dan seluruh jajaran yang hadir di sore hari ini.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Hari ini kita bicara tentang perkembangan situasi terkini pasca perang, bukan pasca ya, situasi terkini selama perang Rusia-Ukraina dan dia merubah secara global konstelasi pergerakan minyak dan gas dunia. Dan ini memang tidak dapat dipungkiri sendiri, Rusia hari ini sebagai eksportir nomor 2 terbesar ya sesudah China. Sebenarnya produsen terbesar itu USA 17 juta barel per *day* tapi karena dia kebutuhannya 19,5 maka dia defisit 2,5. Dia mesti cari dari luar lagi. Sementara Rusia yang menghasilkan 11 juta barel per *day* itu sekitar 7-nya itu dipakai untuk di luar, di luar negaranya. Hari ini dengan embargo bertahan ekonomi, sanksi ekonomi bertahan terus sepanjang situasi tidak menentu antara Rusia dan Ukraina. Maka dia memberikan *multiplier effect* tidak saja bagi negara-negara yang sebagian besar di-*supply* oleh Rusia yang ada di Eropa hari ini sudah berdampak ke mana-mana. Bahkan apa namanya yang diimpor dari Rusia itu bukan cuman yang ada di Eropa. Gas 40% untuk Eropa, oil itu selain untuk Eropa tapi juga ke negara-negara yang lain juga.

Hari ini dengan situasi perang seperti ini maka bisa terjadi kondisi yang paling buruk ya. Skenario *planning* untuk apa namanya *future shock* yang akan datang kalau ini tidak kita sikapi dengan hati-hati bisa terjadi perang energi, udah pasti ini karena semuanya mengalami defisit hari ini karena angka *oil and*

gas yang naik terus tak terkendali. Bagaimana dengan posisi Indonesia sendiri? Tadi saya coba hitung-hitungan kasar, kalau kenaikan USD 1 untuk gas 1,4 T, kemudian 50 miliar untuk metan solar 1,5 triliun, pertalite 2,3 USD 1. Sementara apa namanya selisih *crude* hari ini dan 32 T. Jadi, kalau kita kalikan ini semua untuk gas aja udah 47,36 T, belum yang lain-lain. Jadi, kalau mau hitung total ini mau berapa banyak kita, apa namanya dapatkan dari negara, kita mesti hitungnya riil bener gitu, hitung-hitungannya mesti riil.

Dengan demikian, maka pekerjaan besar untuk kita yang ada di Komisi VII dengan mitra-mitra untuk hitung selisih 1 dolar, jika kita ingin mengoreksi angka yang ada di Rapat Badan Anggaran nanti untuk APBN kita. Maka kita harus hitung untuk gas kenaikannya berapa, metan berapa, solar berapa, pertalite berapa dan seterusnya. Artinya dari posisi subsidi ya untuk migas. Tahun ini kita diangka 77T, jadi kalau kita tambahkan lagi hitungan selisih 32 T itu USD 32 itu udah berapa banyak nanti kita harus ambil dari APBN.

Yang kedua, saya ingin juga dapat gambaran PNBPN kita. Tahun kemarin PNBPN-nya 103 koma sekian triliun. Nah, tahun ini kita ingin dapat angka kepastian berapa PNBPN yang bisa kita pastikan *cash* untuk *this year* itu berapa yang bisa kita dapatkan. Kalau, misalnya kita hitung-hitungan penambahan *volume* misalnya, berapa banyak yang kita juga bisa berikan untuk negara. Jadi, kita akan hitung *balance sheet*-nya dari sisi energi untuk neraca energi kita. Mestinya hari ini dari 3 pihak ini harus keluar neraca energi, nggak bisa hitung-hitungan kasar kayak gini Pak. Jadi, kalau neraca energinya keluar jadi enak kita bicara, berapa kita bisa otak-atik turun-naik untuk apa namanya memastikan bahwa dari Komisi VII kalau kita bawa ke Badan Anggaran untuk tambahan *volume*, untuk solar misalnya naik lagi 2 juta kilo liter misalnya untuk metan, tambah lagi misalnya 100 KL misalnya, terakhir 480 ya, kurang lebih 500. Kalau kita tambah 100 lagi maka itu hitung-hitungannya jadi berapa gitu loh, sehingga aman untuk kita membawa ke Banggar ada dasarnya.

Kemarin di dalam Rapat Banggar, Bapak/Ibu, itu kencang kali apa namanya sinyal yang sangat kuat, pesan yang dikeluarkan sangat kuat dari Ketua Banggar adalah soal data penduduk miskin. Jadi, mestinya juga harus ada simulasi sampai dengan tahun ketiga pandemi Covid ini harus juga dikomparasi dengan data penduduk miskin, berapa banyak gitu loh. Kemarin kan terjadi ada tarik-tarikan yang cukup panjang dan alot, mau dialihkan itu kan menjadi bantuan sosial dalam bentuk apa itu kartu dan yang lain-lain. Kita semua Indonesia Timur ribut, kalau ini diberikan dalam bentuk kartu daerah-daerah entah listrik, entah BBM yang tidak kita lihat apa gunanya ini kartu. Kartu itu dipakai kita di pulau perbatasan datang sampai di pusat kabupaten untuk dapatkan beli BBM kan, tidak rasional gitu.

Jadi yang ini kekhawatiran saya, yang saya takutkan dengan posisi APBN kita hari ini yang juga agak goyang ya kalau saya harus bilang, agak goyang, hutang kita sudah di atas 7.000 triliun hari ini. Saya agak ada sedikit khawatir, apakah bisa ada kemungkinan nanti di Badan Anggaran dipaksakan untuk pemberlakuan hal ini gitu loh, mempercepat pemberlakuan ini. Kemudian untuk gas 3 kilo dibikin tertutup dan seterusnya, dan seterusnya untuk memangkas apa namanya pengeluaran yang besar.

Saya hitung-hitungan kalau modelnya kayak begini Pak, paling kalau penduduk miskin hari ini berapa ya tinggal berapa belas juta ya. Sembilan persen dari jumlah penduduk kita kalau dikali sekitar 5 juta aja baru sekitar 35 triliun. Kalau, kata kasarnya kalau betul-betul mau main dari Kementerian Keuangan mengambil keputusan yang sangat drastis gitu. Jadi, memangkas habis seluruh subsidi energi ini. Nah, posisi tawar kita hari ini, rakyat hari ini butuh penyangga energi hari ini untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kita akan tempur habis-habisan tapi juga harus pada angka-angka yang realistis. Jadi, kalau bisa ada dokumen tambahan untuk *balance sheet* energi, neraca energinya bisa kita dapat jadi bisa sangat membantu kami di Komisi VII untuk perhitungan yang berkaitan dengan apakah APBN perubahan atau apakah pembahasan refocusing dan alokasi, ataukah APBN 2023 yang akan datang, jadi buat saya itu.

Untuk yang terakhir untuk Kepala BPH Migas, Ibu Erika, kemarin waktu reses kita dua apa namanya berkoordinasi cukup panjang karena khusus untuk methan. Hari ini semua memberikan perhatian serius untuk LPG, untuk solar dan lain-lain. Kami yang di wilayah-wilayah yang nonkonversi dari methan ke gas, kita ini cuma punya pilihan ini satu methan untuk rakyat kecil Bu, tidak ada alternatif BBM yang lain untuk hari-hari masak dan yang lain-lain.

Nah, harapan kita mestinya untuk wilayah-wilayah nonkonversi ini diberi afirmasi kebijakan. Jadi, begini Bu, di provinsi-provinsi lain, di Kalimantan misalnya ya mungkin ada kecamatan yang belum konversi tetapi secara *overall* provinsi itu udah masuk di dalam konversi, methan ke gas, nggak bisa disamakan dengan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT yang cuman punya satu ini yang kalau Ibu memukul rata, potong sama rata untuk semua kabupaten/kota itu artinya tidak fair untuk kami Bu, apa membuat kita balik lagi ke zaman kayu bakar atau bakar batu. Ini kan di dunia ini kan tidak realistis tapi kepentingan kami adalah kita ingin ketahanan energi dan keadilan energi terjadi antara kawasan barat dan kawasan timur.

Jadi, ini substansi yang saya hendak memberi kesan kuat bagi kita saat ini, di tengah-tengah situasi bahkan mungkin ke depan akan terjadi kelangkaan BBM dan seterusnya. Ini kan yang kita harus diupayakan, jangan sampai terjadi diskriminasi dalam pemberlakuan pendistribusian antara *region* dan apa namanya ketersediaan dan keterjangkauannya.

Saya kira mungkin itu dari saya Pak Ketua, jika memungkinkan mungkin kita bisa perdalam lagi sampai bisa mendapat angka-angka yang pasti untuk kita nanti bawa ke Banggar.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon maaf Pak saya putar dulu ke temen-temen Golkar Pak, ke fraksi berikutnya. Sekarang teman-teman Golkar nanti kita sambung di putaran kedua Pak Ismail.

Silakan Bu Roro.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Ketua Pimpinan dan seluruh anggota yang saya banggakan, dan

Juga di sini hadir Dirjen Migas,

Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas, dan

Seluruh jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu dan tadi sudah diutarakan oleh para mitra kerja kami, bahwasanya kondisi geopolitik dunia dengan adanya perang Rusia-Ukraina itu sangat berdampak ke negara Indonesia bahkan dan ini mempengaruhi harga gas hingga minyak dunia. Tadi sudah disampaikan juga ketika kita *compare* gitu ya bulan Februari dan Maret mengacu terhadap *brent price* yang tadinya 94,1 dolar itu sekarang hingga mencapai 112,7 dolar. Dan telah tercatat tadi di *slide* nomor 4 kalau tidak salah pemaparan dari Kementerian ESDM, Pak Dirjen bahwa ini belum mencapai puncak gangguannya gitu. Jadi kalau saya melihat ini sifatnya masih fluktuatif sekali gitu ya harga minyak dunia kali ini.

Dan ketika kita mengacu terhadap subsidi BBM dan juga LPG 3 kg kalau di dalam APBN kita itu di kisaran Rp77,5 triliun dengan asumsi ICP mohon maaf, sebesar 93 dolar per barel. Di bulan Februari kisarannya di 95,7 dolar per barel dan Maret, bulan Maret berarti bulan ini, bulan Maret ini 114,5 dolar per barel. Maka selisih harganya ini kan ataupun harga acuan ICP dalam APBN ini ditambah juga perkembangan harga ICP cukup besar gitu, dia bisa meningkat kurang lebihlah 30 hingga 50 dolar per barelnya. Maka saya rasa dan ini pasti akan terjadi bahwa dengan meningkatnya harga jual, harga tersebut ini berdampak terhadap harga jual ke masyarakat. Kembali lagi tadi disampaikan oleh Bu Mercy juga bahwa yang terbebani kembali lagi adalah masyarakat begitu.

Nah maka saya ingin tahu secara garis besar sebetulnya tanggapan dari ESDM, dari Pertamina, dari BPH bagaimana kita menghadapi situasi seperti

ini. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai bagaimana untuk mengurangi impor LPG, jalan keluarnya salah satunya adalah dengan kita melakukan substitusi dengan DME. Apakah ini *possible*. Nah, ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada ketiga mitra kerja yang hadir pada kesempatan hari ini dan berapa cepat kita bisa merealisasikannya mengingat juga fluktuatif daripada harga minyak hingga gas dunia saat ini, hingga di Indonesia juga mengalami hal yang sama.

Lalu kemudian yang kedua, saya mohon sekali untuk disiapkan analisa sensitifitas gitu ya dampak kenaikan harga minyak dengan beban subsidi. Lalu kemudian setiap harga naik 1 dolar saja berapa subsidi yang nantinya akan diperlukan. Ini saya rasa perlu ada analisis terhadap hal tersebut, mengingat kembali lagi ini situasinya masih sangat fluktuatif gitu. Jadi, kalau bisa disiapkan semacam apa gambaranlah dalam beberapa bulan ke depan maupun 1 tahun ke depan.

Dan ketika kita berbicara mengenai subsidi, ini yang terakhir. Ketika kita berbicara mengenai subsidi, siapa yang akan menanggung beban subsidi tersebut. Apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan atau, atau apakah nanti akan dibebani Pertamina gitu. Dan walaupun situasinya demikian siapapun yang nanti akan tanggung jawab dalam hal ini, apakah sanggup. Nah, ini juga saya rasa pertanyaan yang patut untuk kita pelajari bersama karena saya sangat miris sebetulnya ya, ini di *slide* nomor, nggak ada nomornya tapi ini ada di Dirjen Migas, dari Kementerian ESDM membahas mengenai kondisi stok BBM dan LPG nasional kita. Di mana digambarkan ini hingga 20 sampai 50 harilah, saya rasa ini kan sangat amat mempengaruhi ya di mana ketahanan energi nasional kita menurut saya sangat rentan gitu, Pak.

Jadi, saya mohon nanti penjelasannya mungkin secara garis besar, walaupun tadi ada analisa yang saya minta, saya harap nanti akan diberikan kepada kami agar kami pun bisa mengetahui gitu jangka panjangnya seperti apa.

Sekian dan terima kasih Pak Edi.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lanjut Fraksi Partai Gerindra ada Pak Moreno atau Pak Ramson. Pak Ramson.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan rekan-rekan anggota yang terhormat,
Pak Dirjen,
Bu Dirut Pertamina,
Bu BPH Migas, dan
Semua hadirin yang saya hormati.

Tadi Pak Dirjen Migas pertama sudah mengupas mengenai rudal, Eropa, artinya intinya, singkatnya faktor geopolitik. Faktor geopolitik ini pergeserannya memang sangat mempengaruhi konstelasi atau keamanan energi kita, juga keamanan energi global. Inilah di kehidupan ini kadang-kadang satu negara, satu organisasi, antar negara kadang-kadang orang per orang bisa merubah konstelasi, itu repotnya. Gara-gara Zelensky bekas pelawak itu main mata sama NATO, tentunya Rusia melihat itu potensi ancaman jangka panjang ya dilibas, dia mau lihat kekuatan Eropa berani nggak, digertak nggak berani juga, sistem persenjataan nuklir minta di-on-kan gitu akhirnya kita juga jadi kena nih sekarang. Itu memang jadi pemimpin politik itu ya konsekuensinya sangat besar Pak Dirjen, baik di suatu negara maupun antar negara. Salah membuat keputusan, global efeknya, *impact*-nya global. Termasuk ini kalau enggak main mata sama NATO, Rusia nggak bakal masuk.

Jadi, saya juga kebetulan cukup mendalami juga soal *security* Pak Dirjen, saya prihatin juga. Termasuk sekarang, jadi susah tidur nih. Bu Nicke sebagai Dirut Pertamina kalau harus menyediakan *supply* energi yang cukup untuk rakyat Indonesia karena itu tugas dari pemegang saham. Ini memang yang Pak Ketua rapat yang, Pak Ketua komisi yang perlu kita *back up* dari sisi keputusan politik apa yang bisa kita buat agar tugasnya Bu Nicke ini sebagai Dirut Pertamina, sebagai operator bisa lancar mensuplai energi, BBM dan LPG ke masyarakat.

Tentunya tadi sudah diuraikan panjang lebar dan juga perlu juga Pak Dirjen diperhatikan di faktor kebijakan mana sekarang yang memperlemah kalau membuat solusi tersebut dari operator. Seperti misalnya dari BPH Migas mengenai kuota-kuota, apakah per kabupaten apa tadi, kalau perlu di *re-thinking* dirobah strateginya begitu. Kalau itu sudah tidak efektif dirubah cepat gitu, baik dari kebijakan Kementerian ESDM, baik juga dari BPH Migas, ini BPH Migas, saya lihat, maaf aja nih kurang proaktif juga, data aja nggak langsung di-*apply* kalau tadi. Jadi, jangan mengutip ininya Menteri Keuangan tapi lihat dong waktu membuat asumsi kuota itu berapa pertumbuhan ekonomi. Jangan-jangan sama dengan yang terjadi sekarang.

Jadi, itu kalau ini saya kupas banyak Pak Dirjen, hanya saya minta cepat diadakan dari sisi pemerintah Kementerian ESDM dan juga BPH Migas menyesuaikan regulasinya, peraturannya, kebijakan yang imperatif gitu agar Pertamina bisa lebih fleksibel. Dari sisi kita, Pak Ketua, kita buat keputusan politik. Misalnya supaya keseimbangan keuangan Pertamina itu siap gitu, artinya tidak mengganggu *cash flow* dengan harga misalnya *crude oil* di pasar global, juga harga gas di pasar global. Jadi, supaya ada keseimbangan karena beda posisi BBM dengan posisi minyak goreng, kalau minyak goreng saya terus terang aja menterinya nggak tepat itu mengelola itu. Kita punya produksi

CPO 54 juta metrik ton, yang CPO untuk diolah, olahan termasuk untuk minyak goreng dan margarin segala itu. Itu hanya 8,7 juta metrik ton untuk solar, untuk biodiesel 8 juta metrik ton, masih ada sisa 37 juta metrik ton tetapi kenapa menjadi langka saat itu.

Nah, ini terus terang aja ini juga untuk Pak Dirjen dari sisi eksekutif disampaikan kepada Pak Menteri dan juga koordinasi antar menteri, itu mengelola keseimbangan itu sebenarnya nggak sulit itu, nggak sulit, kan koordinasi aja dengan pihak mana. Mudah kok itu mengontrol setiap CPO dikirim ke mana karena yang produsen CPO dengan pabrik minyak goreng ada yang sama, ada yang nggak. Jadi, itu analogi terhadap posisi BBM sekarang, kalau posisi BBM sekarang memang total dipengaruhi oleh harga minyak global karena saya lihat tadi di sini juga ICP juga dinaikkan oleh pemerintah karena jatah pemerintah yang terbanyak dari semua produksi minyak mentah sekitar 60% itu jadi milik pemerintah. Sebagian untuk *cost recovery*, sebagian bagiannya kontraktornya termasuk Pertamina juga di situ, termasuk yang lain-lain. Jadi, pemerintah yang terbanyak memiliki *crude oil* tapi dijual tetap harga tinggi saya lihat, tidak begitu beda ICP dengan *brent*, sama yang lain, di situ harus dilihat keseimbangannya.

Jadi, memang ini kita menghadapi dilema sekarang ini kalau enggak bisa dikelola dengan baik dampaknya agak kurang bagus, karena apa? Kita juga banyak belanja-belanja yang besar di sektor lain. Kita harus membangun IKN juga, Pak Menteri Tifatul kita harus membangun IKN, butuh anggaran juga iya kan. Ini kan harus kita ajak juga diskusi yang sedikit oposisi kan gitu.

Jadi, itu aja Pak Ketua. Jadi, bagaimana kita membuat dukungan terhadap, dukungan politik terhadap Pertamina agar lebih fleksibel untuk bisa memecahkan masalah-masalah operasional di lapangan. Dan tadi dari pihak pemerintah Kementerian ESDM, juga regulator BPH Migas harus lebih proaktif jangan lagi *business as usual* ininya berat ini Bu Kepala BPH Migas dan juga komite yang lain, nggak main-main ini sekarang konstelasi ini, harus lebih menguras pikiran ini.

Demikian Pak Ketua, saya tidak banyak saya ulas di sini biarpun di sini bahannya udah banyak tetapi yang penting kita buat nanti keputusan politik mendukung Pertamina sebagai operator untuk bisa menangani ataupun membuat solusi terhadap persoalan-persoalan di lapangan sekarang ini. Sehingga suplai energi khususnya BBM dan gas kepada masyarakat itu tetap terpenuhi dan tidak terganggu karena itu tugasnya Bu Dirut juga untuk mengamankan agar juga aman pemerintahan ini karena Bu Dirut nggak mungkin mengkritisi pemegang saham, nggak mungkin. Bu Dirut harus tunduk terhadap arahan pemegang saham pemerintah, tetapi kita harus memberikan dukungan politik dan juga bisa mengkritisi.

Demikian.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ramson.

Lanjut Fraksi Partai Nasdem, Pak Rico Sia silakan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih Pimpinan, terima kasih rekan-rekan.

Langsung saja, terima kasih juga paparan yang sudah diberikan oleh Pak Dirjen Migas, Kepala BPH dan Ibu Dirut Pertamina. Pak Dirjen tadi membahas terkait dengan segala tadi geopolitik, Ibu Kepala BPH sudah membahas terkait dengan regulasi, terus kemudian dia punya penyaluran kuota dan bahkan sampai dengan detail, sampai dengan apa yang temuan-temuan di lapangan. Ibu Dirut sudah juga menyampaikan kenaikan harga dan tadi sudah semuanya dibahas oleh Ibu Mercy dari PDIP, Ibu Roro dari Golkar dan tadi disampaikan oleh Pak Ramson ada, kita harus membuat keputusan politik buat mendukung Pertamina.

Nah, saya sepakat dengan semuanya dan singkat saja mungkin terkait dengan apa mohon dukungan dari Ibu Dirut terkait dukungan yang diperlukan di sini kan ada di halaman 5, halaman 10 ada poin 1 sampai 5 ya. Saya pikir semua ini ada di BPH sama BPH ya, Ibu Kepala BPH semua ini ada di kepala, di tangan Ibu nih bersama jajaran nih, sama Pak Dirjen, mudah-mudahan kita bisa dukung Pertamina karena Ibu Dirut Pertamina beserta jajaran yang menghadapi segala sesuatu di lapangan. Dan jangan pernah kita biarkan satu-satunya yang kita miliki ini kemudian ada permainan di luar sana yang kita enggak tahu apa, yang kemudian akhirnya mematikan kita punya yang satu ini, sangat disayangkan apabila ada yang bermain di luar sana namun korbannya adalah Pertamina.

Jadi, sangat besar harapan kami agar BPH, Pak Dirjen beserta semua jajaran tolong sampaikan juga ke Pak Menteri agar ini kalau bisa segera disikapi, sehingga Pertamina bisa leluasa dan segera bisa kembali, bergairah kembali karena sekarang pasti pusing terus ini kelihatannya.

Terima kasih, Pimpinan. Demikian dari saya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rico.

Lanjut Fraksi PKB, silakan Pak Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera, sore ini.

Pimpinan kemudian sahabat-sahabat anggota Komisi VII,
Para Direktur Pertamina dan seluruh jajaran,
Kepala BPH Migas dan seluruh jajaran,
Dirjen Migas serta seluruh jajaran,
Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Saya kira saya tidak akan panjang lebar bicara soal apa yang menjadi dampak perang antara Ukraina, maupun Arab dengan Houthi dan sebagainya. Yang jelas yang masalah kita di depan mata adalah ada beban yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun APBN kita terhadap akibat dari naiknya harga *crude* dan lain sebagainya itu. Untuk itu yang mesti kita lakukan, yang pertama adalah apa yang harus kita dukung kepada Pertamina, kepada BPH dalam konteks agar ini bisa diselesaikan, ada solusi, itu aja sebenarnya yang penting.

Saya mendengar ada utang Kementerian Keuangan kepada Pertamina yang nilainya sekitar hampir 100 triliun betul ya. Ini yang pertama menurut saya harus kita dorong. Komisi VII harus mendorong agar ini dibayar secepatnya untuk menjaga kemungkinan terjadinya nanti, apa persiapan kita agar kalau terjadi nanti stok habis atau cadangan habis yang ada di Pertamina atau membantu subsidi karena ini udah naik ini. Tadi Mbak Roro cerita dari 63 menjadi 100 berapa ICP-nya itu ya jadi bedanya cukup besar. Itu yang pertama.

Jadi, saya kira Komisi VII harus ikut membantu melakukan dukungan politik atau melakukan koordinasi dengan komisi-komisi terkait, mengundang Kementerian Keuangan untuk segera menyelesaikan ini. Dan mungkin nanti sedikit penjelasan Bu Dirut, dijanjikan sama keuangan ini mau dibayar kapan, bertahap atau mau *cash* itu perlu ada penjelasan.

Yang kedua untuk BPH Migas, ini kan soal kelangkaan solar jadi masalah ya, jadi ramai. Menurut saya ada beberapa hal yang harus kita tempuh. Yang pertama, titik-titik kelangkaan yang sudah dimuat di semua media itu segera diatasi Bu, harus ada upaya-upaya khusus untuk ada aksi dari BPH Migas di sana. Apakah melibatkan penegakan hukum atau dan lain sebagainya itu harus ada, supaya masyarakat ini percaya bahwa pemerintah bisa mengatasi. Jangan sampai minyak goreng langka, harga-harga pangan naik, ditambah lagi solar naik dan sebagainya ini bahaya. Ini bahaya bagi pemerintah. Saya ini partai pendukung pemerintah. Jadi, *concern* terhadap kestabilan pemerintah maaf Pak Tifatul ya, mudah-mudahan Pak Tifatul ikut mendukung kita dan Demokrat tuh Pak Nasir depan tuh.

Jadi, saya berharap ada langkah-langkah cepat untuk apa paling tidak di masyarakat itu. Oh, ini pemerintah bisa menyelesaikan ini, BPH bisa nih. Baru yang kedua, baru kita atur apakah ini karena pola pembagian kuota itu atau pola distribusinya dan lain sebagainya kan ada yang minta supaya yang di tempat lain itu bisa dipindahkan ke tempat-tempat rame, yang cepat habis misalnya di jalan-jalan utama dan sebagainya karena memang terjadi banyak

kelangkaan. Di kampung saya di Palu sana juga demikian, bukan hanya sekarang udah lama itu cuma saya males ngomong aja karena pasti sulit mengatasinya. Sekarang di Makassar, di Palembang, di semua tempat ya ini mulai terjadi antrian, jangan sampai Bu terjadi antrian terlalu lama. Itu secara politik tidak menarik bagi pemerintah, menjadi beban. Sudah cukup minyak goreng aja jangan sampai ini terjadi lagi. Saya minta ini ada upaya-upaya khusus dan keras dan canggih dilakukan oleh BPH Migas dan jajarannya.

Yang kedua, ya ditambahlah kuota solar itu kalau bisa. Jadi, menurut saya, Komisi VII perlu mendorong karena enggak mungkin BPH Migas yang melakukan penambahan, harus ada *support* dari Komisi VII bahwa kita harus menambah jumlah kilo liter solar yang kita serahkan kepada, kita dorong untuk dikelola oleh BPH Migas.

Saya kira itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Intinya bahwa apa pun yang bisa kita lakukan harus kita lakukan sekarang dan itu harus di-*blow up* supaya masyarakat paham. Jangan sampai kita dianggap tidak becus mengelola masalah.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Karding.

Dilanjut Fraksi Partai Demokrat, Pak Nasir silakan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII,
Teman-teman Anggota Komisi VII,
Saudara Dirjen dan seluruh jajarannya,
Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya,
BPH Migas beserta jajarannya.

Sebenarnya aneh saja Pak, saya melihat kasihan rakyat, masa' yang beli ngantri, yang nyuri nggak ngantri, gitu. Di Sumsel itu 1 hari 15 ribu barel hilang *crude* kita, nggak ngantri Pak, nangkapnya cuman 6 truk saja, yang lain ke mana gitu. Nah itu dituntaskan Pak, kalau dihitung 450 ribu itu per bulan barelnya, nggak ngantri itu Pak, sampai ini hari enggak selesai ceritanya. Nah, ini Pertamina di mana, Bapak di mana, BPH Migas ini di mana gitu loh. Kalau, soal tadi ada perang, ini tanggung jawab negara memang harus hadir di situ, ya memang negara sana mau perang ya sudah, kita ngadepinlah harga *crude* dunia naik ya memang seperti itu. Tapi bagaimana membangun regulasi ini, itu

yang penting seperti disampaikan tadi sahabat saya Pak, Bu Mercy neracanya mana, biar ini yang kita pelajari. Ini jangan jadi bohong-bohongan gitu loh, ini rakyat semua Pak setengah mati nunguin BBM sekarang, tapi pom bensinnya nggak ada yang diberikan sanksi. Tadi yang seperti Ibu bilang, jerigen, semua pom bensin sekarang pakai jerigen tapi nggak ada yang diberikan sanksi. Masyarakat itu rata-rata cuma naik sepeda motor, berapalah sepeda motor itu, rata-rata udah beli pertamax lagi saya lihat, pertamax ini untung, bukan rugi.

Saya tadi baca 1 bulan kalau saya nggak salah 2 juta berapa tadi Bu solarnya? 2 juta koma, izin Pimpinan, 2 juta berapa Bu? 2,2. Coba jelaskan Pak Dirjen berapa jumlah impor solar yang masuk ke Indonesia, kenapa mereka nggak numpang juga subsidi nambahin bantu masyarakat, kenapa mikirin perusahaannya saja. Bapak sebagai Menteri ESDM harus memikirkan ini, mereka cuman mencari keuntungannya saja. AKR itu paling besar di sini (*suara tidak jelas*), perusahaan-perusahaan tambang itu cuman memikirkan keuntungannya saja. Tapi pernah nggak setor ke Pertamina, di mana sekarang tanggung jawabnya. Saya minta neracanya Pimpinan, neraca ini seperti apa gitu loh, jangan jadi bohong-bohongan aja. Itu Sumatera Selatan saya jumpa Kapoldanya sampai ini hari nggak ditangkap pelakunya, minyaknya, *crude*-nya hilang semua.

Makanya saya minta alihkan itu ke Pertamina biar *crude*-nya tambah dan saya minta kilangnya Pertamina ini kalau yang nggak bisa menguntungkan di *stop* saja, bagus *crude*-nya kita jual, bagus kita beli, daripada kita kelola gitu loh. Itu butuhnya neraca tadi, jadi jangan cerita jadi bohong-bohongan gitu loh kalau FAME-nya mahal jangan dibeli, ini pemain semua gitu loh. Ongkos FAME-nya saja itu selisihnya 1 triliun. Ibu ngomong Bu Dirut jangan diam saja. Itu selisihnya 1 triliun, kenapa nggak Pertamina yang suruh angkat biar Pertamina yang dapat untung. Jangan ditutup-tutupin gitu loh, ada apa ini semua gitu loh. Masyarakat di sana ngantri BBM-nya, di sini seneng-senengan nikmatin keuntungan itu. Pertamina ini udah nawar pengangkutannya, kenapa nggak Bapak berikan, kasih dong, selisihnya 1 triliun tuh Pak 1 bulan, masa dibiarkan, itu sudah bisa nambahin gitu loh, bisa nyari yang lain lagi, belum lagi selisih *crude*-nya lagi, eh FAME-nya itu. Kalau FAME ini mahal ya udah tutup saja, ngapain dibeli kan repot jadinya. Kalau kita, kalau dagang Pak cari yang untung bukan cari yang rugi, bukan cari yang pening gitu loh. Negara lagi pening ditambahi pening lagi, kan pusing. Orang kebijakannya gampang kok, ya ini nggak usah dibeli dulu FAME-nya 5-6 bulan ini bisa kok, kita beli *crude* aja yang udah jadi, yang lebih murah *cost*-nya kan bisa gitu loh.

Izin interaktif, Bu berapa kilang yang bisa ngelola *crude* kita? Berapa yang enggak bisa? Matikan, jadi *cost*-nya kecil. Soal pegawai Ibulah yang ngurus, mana kita tahu, yang penting rakyat jangan susah, lebih penting kita memikirkan rakyat ini daripada ini. Mati nanti rakyatnya kalau gini, udah penghasilan nggak ada, disuruh beli udah minyak goreng mahal, BBM-nya begini lagi. Saya ke dapil Pak, yang ditanya, Pak kok ini ngantri solarnya nggak ada, saya pun bingung. Telepon Bu Dirut, telepon Pak Alvian hem tambah parah lagi. Itu pasar bawah Pak, itu maling semua itu tapi enggak ada yang ditangkap sampai ini hari di tempat saya itu. BBM murah dibawa ke dalam sana, dijual, harganya nggak karu-karuan gitu tapi hari ini nggak ada juga yang

tertangkap. Di Sumatera Selatan itu kapolda-nya duduk-duduk aja nyantai aja cuman 6 tanki yang ditangkap, apa-apaan gitu loh, kan repot kalau kayak gitu.

Saya minta Pak semua blok yang dicuri itu serahkan ke Pertamina, pihak hukum untuk mengamankan aset negara, itu benar. Macam angkutan tadi saya minta keputusan nanti Pimpinan di sini dibuat, angkutan *crude*, angkutan FAME itu diserahkan ke Pertamina. Kita lebih mementingkan perusahaan negara Pak daripada *person to person*-nya gitu. Jadi, *clear*, itu selisihnya 1 triliun Pak, sebulan. Jadi, jangan yang begini-begini gitu loh, ini sama Menteri Keuangan yang dibahas apa, orang Menteri Keuangan yang ngasih uang kok, kan aneh gitu loh. Memang penanaman modalnya dari mana kalau nggak dari negara. Ini kan cuman penugasan Pertamina gitu loh. BPH juga apa yang ditunjukkan cuman 4 gambar, semua kelakuan ini di setiap provinsi ada, tapi nggak ada yang anda lakukan. Makanya saya bilang Ketua BPH Migas ini kita putar ulang. Siapa yang mampu mengatasi masalah ini, itu yang kita pilih gitu loh.

Saya minta Pimpinan, kita buat panjangnya. Kita buat pemilihan ulang lagi biar *clear* gitu loh. Saya minta Pimpinan, nanti diputuskan masalah FAME di sini itu ada selisih 1 triliun, itu bisa membantu Pertamina untuk, kalau 3 triliun itu sekarang diserahkan mungkin udah dapat untung Pertamina ini hampir 1,5 triliun bener kan Bu Dirut. Jadi, *clear* gitu loh 1,5 triliun per bulan. Itu belum urusan FAME masih angkutan saja. Ini rakyat berderet-deret berkilo-kilo sekarang ngantri. Kita pun udah pening jawabnya apa mau kita bilang, tanya nanti Bu Dirut, tanya Pak Alvian begitu lagi urusannya, ah kacau kita udah. Alasannya perang dunia, perang Ukraina dan Rusia, kita nggak nyambung juga apa ini saya pikir, ya memang mau naik barang ini ya naiklah, apalagi. Kalau Bapak naikkan BBM naiklah semua ongkos angkut, naikkanlah gaji masyarakat kan *clear*, solusi juga. Rakyat cuma naikkan gaji kami, nggak apa-apa naik kayak orang Singapura itu kan, upahnya besar mau naik berapa pun nggak apa-apa nyantai aja, gaji kita naik kok. Nah ini yang naik dinaikkan, gajinya nggak naik-naik ya pusinglah masyarakat. Itu nggak solusi Pak, solusinya apa gitu loh, kalau cuman dikasih sembako-sembako ini cuman 2 hari habis gitu loh, nggak ada gunanya ini. Nanti Menteri A bagi sembako, Menteri B bagi sembako, ini seminggu selesai gitu loh ya itu kalau dikasih CSR, kalau nggak dikasih pun *wassalam*-lah udah, apalagi, itu aja masalahnya.

Jadi, saya minta Pak Dirjen, Bapak sebagai negara di sini yang menugaskan Pertamina bagaimana solusinya, BPH sebagai pengawas mana yang pelaku penjahat itu tunjukkan di sini bukan cuman 6 tangki itu. Kita sudah pergi sama Pak Dirjen ketemu malingnya lagi kita di sana, bener kan Pak Dirjen, jadi itu. Itu yang perlu di-*clear*-kan gitu loh, itu *crude* 1 hari Pak 15 ribu barel, kalau 1 bulan 450 ribu, kalau ditambahkan tadi dengan kebutuhan itu udah hampir kan berapa triliun itu Pak uangnya. Nah, itu yang diselesaikan gitu loh, cadangan-cadangan kita yang kurang itu yang dikejar supaya bagaimana mengatasi masalah ini, berapa sekecil-kecilnya kita impor itu dagang Pak, kalau begini solusinya ya makin peninglah Pertamina. Udah tambah pening dipanggil pula ke DPRRI, tambah pening lagi. Itu masalahnya di situ, saya bukan bela Pertamina tapi Pertama ini hanya penjual saja, harus cari untung. Kalau dagang rugi Pak ngapain dagang, ya namanya nggak dagang. Subsidi itu perintah pemerintah. Itu jelas memang pemerintah memberikan subsidi

supaya masyarakat yang tidak mampu mendapatkan perolehan itu. Setuju kita tapi kan harus ada neracanya tadi berapa yang harus kita subsidi, jangan mobilnya innova ngisinya solar kan repot gitu loh. Itulah BPH tapi nggak ada tanggung jawabnya BPH ini. Kalau cerita cuman ini dimodifikasi, semua pom bensin Bu, diisi pakai mobil yang seperti itu, tapi sampai hari ini nggak ada yang Ibu tangkap dan pengawasan Pertamina juga nggak ada.

Saya minta Pak Dirjen, jadi nggak usah kita cerita bohong-bohong di sini. Selesaikan saja masalah yang tadi, selesai. Dan saya minta semua yang impor kita minta datanya nanti, ini kita *clear*-kan Pak. Pertamina ada impor nggak, izin Pimpinan? Nggak ada ya. Harusnya kalau dia bisa beli solar murah jual ke industri biar ada profitnya, jangan swasta aja yang suruh dapat profit, Pertamina juga harus dapet profit dong, iya suruh juga impor. Kan ada selisihnya kan, kan bisa menambah tadi kerugian-kerugian yang dikasih masyarakat katanya, ini untuk masyarakat pun dibangkitkan repot kita jadinya.

Izin Pimpinan, kita minta nanti masalah impor, masalah pengangkutan tadi yang ada selisih ini, terus masalah kehilangan *crude-crude* kita. Nah, ini yang perlu kita bahas bagaimana memperkecil kerugian negara. Kalau soal utang tadi Menteri Keuangan seperti yang dibilang sahabat saya dari PKB itu perlu, cuman Menteri Keuangan juga yang ngasih uang juga, nanti kalau ditagih marah dia bahaya juga iya kan, betul kan Pak Ramson itu kan sahabat Bapak, itu Menteri Keuangan, sahabat beliau Pak makanya saya sampaikan. Jadi, gitu Pak Dirjen, jadi saya minta BPH kalau ini nggak *clear*, saya minta Ketua BPH kita putar ulang, kalau enggak *clear* dan ndak bisa menuntaskan regulasi ini. Saya minta Pertamina juga harus tegas menjalankan regulasi ini. Kalau perlu impor untuk mengurangi kerugian, kita impor. Kalau Pak, kilangnya memang rugi untuk mengelola *crude* kita ya *crude* kita diekspor saja Bu, eh diimpor, diekspor aja, diekspor, beli *crude* yang murah kan mungkin jenisnya beda-beda. Ibu bilang, coba kita cari yang lebih murah yang bisa kita kelola supaya ada selisih. Saya dulu ada orang Pertamina yang menjelaskan lebih untung impor daripada mengelola *crude*. Ini kalau saya nggak salah luruskan Bu, ya nanti tolong dijelaskan kenapa bisa mengelola *crude* sendiri lebih mahal daripada mengimpor bahan jadi. Jadi, kalau solarnya murah di luar ya beli dari luar karena solar yang dari Palembang itu dijual ke masyarakat murah. Betul kan Pak Dirjen. Itu harus *clear* gitu loh. Itu aja yang tuntaskan.

Mungkin itu aja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahita'ala Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lanjut Fraksi PKS, Pak Tif silakan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera atas kita semua.

*“Awat tertusuk durinya mawar,
Durinya tajam setajam silet,
Awat mengurus minyak dan solar,
Barangnya licin mudah terpeleset”.*

Udah sore ini, ini kalau Pak Nasir udah ngomong nih hadirin-hadirot nih deg-degan, ini apa-apa, ada yang diganti, ada yang diusir apa nggak nanti gitu tadi ya.

Jadi, terima kasih atas Pak Dirjen pemaparannya Bu Kepala BPH Migas, kalau orang Bu Dirut ya Pertamina, bicara sama orang Medan ini jangan pakai perasaan nanti stres pula kita ya, jadi agak rileks sedikit, begitu ya.

Yang pertama ini urusan kelangkaan-kelangkaan tadi udah banyak dan panjang diuraikan oleh Pak Nasir. Memang betul, saya setuju juga dengan Pak Ramson tadi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi misalnya menyebabkan kebutuhan bahan bakar ini juga meningkat, perlu juga memang diapakan ditampilkan angka asumsi awalnya. Sehingga melonjaknya itu menyebabkan ya ini berapa persen kenaikan itu juga perkiraan-perkiraan, adalah angka kita berpijak dari awalnya.

Kemudian juga saya menyoroti bahwa katakanlah *recovery* pasca pandemi yang lebih cepat dari perkiraan ini, PPKM diturunkan terus terjadi peningkatan konsumsi BBM. Ini saya rasa Bu Kepala BPH Migas ini juga ya namanya asumsi ya. Sebetulnya Januari dan Februari ini angka Covid itu tinggi loh. Jadi, Omicron ini walaupun dia gejalanya bagi anak-anak muda tidak begitu berat, akan tetapi angka kematiannya tinggi, pernah 400 lebih sehari itu ya daripada Delta. Dan saya sendiri mengalami apa yang disebutkan oleh Pak Nasir tadi bulan Agustus tahun 2021, belum ada lagi Bu *recovery* seperti ini, itu saya bawa mobil dari Jakarta ke Bukittinggi wah itu setiap SPBU itu, tidak ada SPBU satu pun yang tidak ada antrian solarnya, kenapa? Solarnya belum datang, Bu.

Jadi, di samping SPBU tuh ada yang jual ecer apa itu, sehingga kita terpaksa beli begitu Pak Ketua, tapi dengan harga yang Rp10.000,- Rp12.000,- seliterlah, tapi karena di hutan-hutan itu ya kita belilah daripada kita mogok di jalan kan. Jadi, kemungkinan besar ya peluangnya betul itu penyelundupan atau penimbunan, Bu. Ini perlu menurut saya apa ya semacam operasilah ya karena ini kayak menghadapi perang kalau menurut saya ini karena yang main ini mafia-mafia juga yang dengan kelengkapannya. Kalau Pak Nasir tadi mengisyaratkan oknum aparat ini terlibat Bu, jangan-jangan oknum di tubuh kita sendiri juga di tubuh pemerintah juga ada yang terlibat, nggak mungkin ini ya, tinggal kita bagaimana menghadapi ini harus ada solusinya gitu.

Saya melihat juga ini komparasi aja, kasusnya minyak goreng gitu, waktu harga ditetapkan Rp14.000,- oleh pemerintah di minimarket dan sebagainya hilang itu, antri sampai itu mati apa, nggak peduli orang Covid itu ngeri itu di setiap kota ya, tapi kalau kita beli di luar Rp18.000,- Rp20.000,- banyak minyak itu, yang harga Rp14.000,- ditetapkan pemerintah itu nggak ada, tapi begitu pemerintah mengumumkan baik sekarang harga Rp18.000,-, Rp20.000,-, Rp22.000,- melimpah dia Bu, nggak ada tuh orang antri lagi. Ini kan penimbunan. Kalau misalnya dia wajar kan kita bisa melakukan apa itu teori-teori *Queuing Theory*-lah istilahnya, ada *Queuing Theory*-kan, ada simulasi panjang antrian berapa, waktu tunggu berapa itu semuanya kan terprediksi gitu. Tapi kalau ada permainan manipulasi ini nggak bisa gitu.

Yang kedua adalah masalah perang ya. Kata orang pengamat perang itu perang, kapan perang itu akan dimulai, mudah dianalisa dan diamati. Tapi kapan perang itu berakhir, akibatnya seperti apa? Susah diprediksi. Nah pertanyaan saya adalah bahwa ini kan istilahnya Bu Nicke ya ada semacam krisis, krisis ya, bagi kita kan krisis. Krisis tentu kita tidak bisa tangani juga ini dengan manajemen biasa, ada krisis manajemen juga. Ciri krisis itu kan 3. Artinya ada *time constraint*, ada *volume* permasalahan yang begitu tinggi dan juga *complexity* masalahnya, kaitannya satu sama lain. Kita nggak punya daya apa-apa mendamaikan Ukraina dengan Rusia ini, apa daya kita? Nggak ada, kalau kata Pak Nasir itu, itu urusan merekalah gitu tadi ya, ngapain dipikirin. Tapi sebetulnya, jadi maksud saya gini jika perang ini panjang, skenarionya terburuknya seperti apa, angka-angka tren ya, kurva menaik dan harga-harganya itu skenarionya BPH Migas seperti apa, kementerian dan juga Pertamina seperti apa. Jadi, jangan tunggu kita di ujung dulu udah kepepet. Nah, itu mungkin *high cost* ya, *high risk-high cost* juga.

Jadi, saya itu saja Pak Ketua, 2 hal. Yang pertama adalah saya setuju dengan penindakan yang lebih tegas ya. Saya pikir ini perlu strategi juga karena ini menghadapi, ya walaupun mafia itu di Itali tapi di Indonesia aja ada mafia-mafia yang seperti itu. Punya pasukan juga mereka di bawah itu Pak, yang penyelundupan dan seterusnya, bisa kerja sama juga dengan orang dalam. Jangan kan di negeri kita, di Amerika sendiri penyelundup-penyelundup bekerja sama dengan petugas. Yang kedua adalah prediksi kita ke depan itu dan skenario kita menghadapinya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Di ujung tadi masih ketinggalan pantunnya Pak, jadi masih ada utang pantun satu Pak Tif untuk kita.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

*“Pohon durian di kebun kosasih
Cukup sekian dan terima kasih”.*

KETUA RAPAT:

Lanjut dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Bu Kapoksi silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati di sini hadir Dirut Pertamina,
Bapak Dirjen Migas,
Ibu Kepala BPH Migas, dan
Semua hadirin yang saya hormati.

Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari berbagai fraksi, tapi ada yang menarik yang saya baca ya dari paparannya Pertamina di halaman 10. Namun, saya ingin me-*refresh* kembali apa sih sebenarnya tugasnya BPH Migas. BPH Migas itu kan sebenarnya dibentuk ya, suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan, pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian. Jadi, bukan hanya di titik a, titik 1, titik 2, dalam tugas BPH Migas itu semua titik di wilayah NKRI ini adalah harus diawasi dan dipastikan terdistribusi dengan baik. Siapa yang memastikannya ya BPH Migas. Kalau BPH Migas tidak mampu melakukan ini, kita perlu pertanyakan kembali, kira-kira apa urgensinya kita punya BPH Migas.

Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pertamina di halaman 10 dari paparannya, saya sepakat. Dalam hal ini tentu ini harus kita transparanlah, terbuka. Bagaimana sih sebenarnya rencana detail atau krisis manajemen, *risk management* terkait kondisi saat ini. Di Sulawesi Selatan untuk solar itu 5 jam Pak antrinya, bayangkan 5 jam di tempat lain bisa satu malam Pak. Itu 3 minggu yang lalu sudah 5 jam, saya enggak tahu per hari ini, 3 minggu lalu tuh sudah 5 jam. Nah, tentunya saya mendukung bahwa kita perlu ada aturan pemerintah. Apakah ini masuk nanti Pimpinan di salah satu kesimpulan bahwa ada peraturan ya di sini hadir Pak Dirjen Migas yang terkait dengan detail segmen konsumen yang berhak ya karena nanti juga saya minta ada kesimpulan rapat, bukan hanya pengawasan. BPH Migas ini kan, anggota BPH Migasnya banyak coba Bu bagi habis. Mereka melakukan pengawasan di provinsi ini, di provinsi ini, di provinsi ini dan kami ingin menerima laporan hasil pengawasannya itu terhadap pemenuhan kebutuhan BBM dan gas dan juga mekanisme pendistribusiannya dalam konteks hari ini adanya krisis.

Kalau denger paparannya tadi semua sepertinya enggak ada masalah ya. Padahal, kami di Komisi VII ini sudah sempat melihat kondisi masyarakat dan juga melihat kondisi Pertamina. Kita harus menyelamatkan Pertamina. Ini aset bangsa, Pertamina ini harus kita selamatkan. Caranya bagaimana nanti kita coba buat dalam satu kesimpulan bahwa apa yang menjadi kewajiban

pemerintah terhadap Pertamina ini harus segera dilaksanakan juga. Tetapi saya melihat Pak Dirjen, pemerintah ini tidak punya istilahnya *roadmap* tentang berapa sih, tadi cuma 21 hari kalau tidak salah ya Bu Nicke ya, sampai berapa hari, ini kalau perang tiba-tiba Indonesia nih hanya punya 21 hari, perang itu lama Pak bertahun-tahun kadang-kadang.

Kita harus punya *roadmap*, kemudian juga punya kira-kira *strategic petroleum reserve*-nya kira-kira berapa hari ini cadangan kita nih. Kita nggak usah berbicara tentang ketahanan energi dululah. Kita berbicara tentang cadangan, berapa hari ini kita bisa cadangan kita, jangan sampai 21 hari. Saya sebenarnya kepengen tahu atau menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat satu *roadmap* yang benar tentang cadangan energi, 21 hari itu terlalu riskan, ini catatan.

Kemudian apa yang menjadi pesan Pertamina di sini. Ini juga penting Pimpinan karena di sini ada standarisasi tarif angkutan barang kepada industri perang tarif. Nah, ini juga harus, ini perhatian pemerintah juga ini ya Pak Dirjen. Kemudian harga dasar, formulasi harga dasar saya harus sepakat bahwa memang dilematis juga kalau dinaikkan harga ya ini juga nggak bagus buat pemerintahan saat ini. Tetapi kita juga harus menyelamatkan Pertamina tetapi harus kita pikirkan bagaimana. Artinya bukan hanya subsidi ya tetapi kalau memang sampai 5 jam sampai 1 hari ada industri yang tidak jalan, di situ juga ada kepentingan masyarakat banyak. Kita tidak melihat kepentingan masyarakat, hanya sekedar memenuhi kebutuhan solar titik, tapi ada industri yang di belakangnya juga.

Nah, kemudian untuk *volume* kuota solar tadi sudah kita sepakati, belum sepakati tapi kira-kira ya memang ada penambahan. Pertumbuhan ekonomi ini juga bergerak ya setelah 2 tahun kita sangat *slow down*. Tentu ini perlu kita pertimbangkan. Nah, ini mungkin nanti menjadi hal yang penting dari rapat ini.

Kemudian untuk BPH Migas ini tentunya perlu misalnya di sini saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pertamina tentang dukungan pengamanan dan sosialisasi pada saat pendaftaran konsumen solar bersubsidi via MyPertamina. Nah, ini sistem ini harus jalan, saya nggak tahu sejauhmana BPH Migas duduk bersama Pertamina. Nah, tentunya ini yang harus difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas ya tentang misalnya evaluasi dan penyesuaian kontrak kerja angkutan industri terkait dengan beberapa instansi. Kalau ini nggak duduk Pak, 5 hal ini ya oleh BPH Migas, ini serius ini apa yang disampaikan oleh Bu Nicke ini menjadi perhatian kita semua dan ini menjadi perhatian pemerintah dan juga BPH Migas ya. Saya juga agak lucu misalnya pengawasannya seperti yang dikatakan Pak Nasir, hanya ditangkap, diawasi di sini. Nah, bagi habis itu Anggota Komite BPH Migas melakukan pengawasan terhadap dan juga pengawasan Pimpinan. Saya harap bahwa kita juga harus keras bahwa ada penindakan. Jadi, ada penindakan terhadap oknum-oknum ya. Kita jangan selalu menyalahkan masyarakat tapi mungkin ada sistem yang memberikan peluang sehingga terjadinya penimbunan-penimbunan itu.

Nah, kemudian tentunya dalam hal ini saya nggak tahu apakah ada tim gugus tugas di BPH Migas seperti yang tertulis. Kira-kira seperti apa karena mohon maaf Ibu Erika saya melihat BPH Migas ini harus di-*speed up* lagi nih kerjanya nih di dalam kondisi saat ini karena negara telah memberikan mandat kepada BPH Migas untuk menjamin ya distribusi bukan hanya di satu titik di Sumatera Selatan atau di tempatnya Pak Tifatul tapi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini tugasnya BPH Migas. Kemudian tentunya kita mungkin harus bisa punya hitungan-hitungan pemerintah kira-kira untuk formula harga dasar JPT solar dan besaran subsidi tetap ini seperti apa karena ini juga kan kaitannya dengan anggaran nanti Pak. Karena, ini sekarang sudah akhir Maret kira-kira 2-3 bulan ke depan kita akan membahas anggaran kira-kira begitu. Nah, ini tentu harus ada hitungan yang tepat terhadap informasi harga dasar JPT solar dan besaran subsidi karena ini punya *impact* terhadap perhitungan asumsi-asumsi nantinya dan juga untuk perhitungan APBN.

Kemudian terakhir yang juga ingin saya sampaikan bahwa dalam hal ini tentunya saya berharap bahwa pemerintah dalam hal ini di sini hadir Pak Dirjen Migas tentu bisa menyiapkan segera roadmap serta infrastruktur *strategic petroleum reserve*-nya untuk mengetahui atau mulai menghitung cadangan BBM nasional. Tentunya *long term*-nya adalah untuk ketahanan energi. Nah, di dalam rapat yang penting ini tentunya sebenarnya kita harus cari solusi. Saya ingin dengar baik dari Pertamina, pemerintah BPH Migas ya kira-kira bisa nggak mengantisipasi kelangkaan solar ini? Kalau bisa, kira-kira berapa hari ke depan karena kita ini kan ditanya oleh masyarakat kita, baik di daerah pemilihan kita maupun di luar daerah pemilihan kita. Dan ini menjadi tugas kita di DPR ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan amanah Undang-Undang Migas, seperti pembentukan BPH Migas itu sendiri, ya tugas dari Pak Dirjen dan penugasan yang dilakukan oleh, yang diberikan kepada Pertamina atau penugasan yang harus dilakukan oleh Pertamina.

Nah, saya ingin dengar dalam kesempatan ini kira-kira berapa hari ini bisa Bapak dan Ibu selesaikan masalah kelangkaan solar ini dan juga kira-kira apa strategi ke depan. Dan terakhir untuk Pertamina, apa yang kira-kira harapan Ibu Nicke Pertamina yang bisa kami lakukan untuk membantu membuat Pertamina bisa keluar dari krisis saat ini.

Demikian, Pimpinan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Bu Andi.

Kami berikan kesempatan untuk anggota berikutnya untuk menanyakan Pak Ismail Thomas, dipersilakan Pak.

F-PDIP (ISMAIL THOMAS, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Ketua.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam damai dan sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pak Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Bapak Dirjen Migas,
Ibu Kepala BPH Migas, dan
Ibu Dirut Pertamina.

Yang ingin kami sampaikan hari ini hanya menguatkan *statement* dari rekan-rekan tadi bahwa yang terjadi di masyarakat itu adalah anomali Pak. Karena, kalau kita mendengar dari Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina, stok kita itu sangat mencukupi, 3 minggu. Tapi, yang ingin saya ingatkan sejak setahun yang lalu di ruangan ini juga, saya sudah menyampaikan surat kepada Ibu Dirut Pertamina supaya segera diatasi, mengatasi permasalahan antri di SPBU ini. Jadi, setahun yang lalu saya sudah ingatkan, *alhamdulillah* Ibu Andi sudah ingatkan bahwa yang sangat bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala BPH Migas.

Jadi, saya kira Pak Dirjen, habis ini sebelum masalah ini sampai ke Pak Menteri segera diatasi ini Pak, setelah rapat berkumpul bertiga bersama mungkin stafnya karena mulai besok ya, saya ingatkan, mulai besok bukan antri lagi. Ini saya dapat apa namanya pamflet seruan aksi. Seruan aksi kami PMI bersama sopir dan masyarakat umum serbu Pemerintah Kota Balikpapan. Ini kan ironis Pak, di Balikpapan ini kota minyak namanya, kilang besar di Balikpapan ini. Jadi, serbu pemerintah, yang jadi sasaran pemerintah kota Pak, Kota Balikpapan, kita lihat saja besok, betul nggak ini pamflet ini, tapi yang jelas saya dapat ini dari orang yang bisa dipercaya. Ini saya ingatkan mulai besok itu bukan antri-antrian lagi, antri ini sudah memang tahunan. Kalau setahun yang lalu, saya kirim surat ke Ibu Dirut Pertamina itu hanya di daerah saya terpencil, Kutai Barat sana. Tapi, sekarang sudah seluruh Kaltim bahkan Ibu tadi sampaikan di Surakarta pun sudah ada. Pak Tifatul tadi kasih tahu ketika pulang ke Medan sepanjang jalan dan ini memang ironis karena isu yang berkembang di masyarakat ini di-*backup* oleh oknum yang antri-antri ini di-*backup* oleh oknum. Saya ndak mau sebutkan oknum mana. Oleh sebab itu, kita RDP pada sore hari ini. Silakan Bapak/Ibu cari oknum siapa, hanya saja memang kelihatannya yang masih bermain ini di level kabupaten/kota sehingga mau tidak mau koordinasi dengan polda-polda yang ada untuk segera membentuk tim bersama BPH Migas dan Pertamina bentuk tim untuk mengatasi masalah ini. Ini sudah tahunan, sudah bukan dan kondisi ini semakin diperparah seperti yang dipaparkan oleh Bapak/Ibu tadi ketika minyak naik, emas naik, tentu keperluan akan BBM orang nggak mau tahu legal atau illegal yang penting orang dapat solar, yang jadi sasaran yang illegal ini.

Jadi, saya kira ini dan memang harus diatasi oleh Pak Dirjen karena masyarakat ini tahunya Pertamina saja Pak. Tidak tahu BPH Migas yang

sangat bertanggung jawab. Tahunya Pertamina-Pertamina aja karena yang urus SPBU apa kan Pertamina. Oleh sebab itu, karena memang masalah ini adalah hal yang tanggung renteng ya saya minta dari Kementerian ESDM yang memang selevel direktur ya harus mengatasi segera.

Saya kira cukup sekian Pak Ketua, apa yang jadi masalah di masyarakat saya kira itu yang jadi intinya karena tangki ini kan dimodifikasi Pak, mobil-mobil tua dimodifikasi dikatakan isi itu 80 liter dibikin jadi 200. Nah, ini yang kencing ke kebun sawit, kencing ke tambang, kencing ke mana-mana dan di-*backup* setingkat aparat di kabupaten. Ini segera Pak diatasi karena seperti yang saya bilang ini, itu sudah mulai demo sudah, bukan antri lagi karena antri itu semua rekan-rekan kasih tahu kan hitung jam Pak. Mereka taruh kendaraan mereka itu bisa satu hari satu malam, yang penting bisa dapat karena ini kan kerjaan mudah ini, bisa untung besar.

Jadi, saya kira demikian Pak Ketua. Semoga ini menjadi pemahaman bagi kita semua dan kondisi ini jangan berlarut-larut, mau masuk bulan puasa sudah antri apa minyak goreng, antri lagi BBM susah, kan jadi susah semua orang. Kita takut dampaknya ya ke negara kita.

Saya kira sekian, Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam damai dan sejahtera untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ismail Thomas.

Berikutnya di ruang hadir secara fisik Pak Nasril Bahar, kami persilakan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati,
Bu Dirut, Pak Dirjen dan Ibu Kepala BPH Migas dan segenap jajaran.

Pak Dirjen ya merujuk di halaman 5, saya tidak perlu prolog ya langsung saja beberapa titik persoalan. Kuota dan realisasi penyaluran 2018-2022, kalau di 2022 kuota kita tetapkan 15.100, 15.100.000 dan terealisasi di 3 bulan ini 25% kan gitu ya Pak, sampai Maret, 27 Maret. Artinya ini posisi dalam pemenuhan kuota dalam hitungan kebutuhan bulanan, kami melihat masih normal. Nah, ini yang dari oh ini data BPH Migas ya masih normal ya Bu. Nah, ada persoalan kelangkaan dalam tanda kutip antrian. Nah, ini kan ada tanda tanya. Berarti ada beberapa *user* ya. Nah, pengontrolan *user* ini yang perlu kita ingin selidiki dan ingin tahu di mana *user* ini yang sesungguhnya yang banyak memakai. Apakah di perkebunan ya terhadap pergeseran JPU solar, JPT solar, apakah di pertambangan ya, apakah di nelayan. Nah, data ini perlu kami ingin tahu dari konteks pengawasan BPH Migas karena masih, dalam 3 bulan baru

25% terpakai dari kuotanya. Artinya apa? Kami melihat ya lemahnya intelijen daripada BPH, lemahnya pengawasan dari BPH, itu hal yang paling krusial.

Kalau dikatakan pada penjelasan Ibu terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 455,2% ini belum Bu, belum, masih mau mengarah. Kenapa? Kita baru sebagian besar ya kita melepas masker, sebagian kecil baru melepas masker. Artinya apa? Kita baru mulai, mesin mulai bergerak. Mesin bergerak, apakah pabrik, manufaktur ya tetapi persoalan pengawasan ini yang paling penting. Antrian SPBU di pinggiran-pinggiran perkebunan ini sangat luar biasa kemarin di Sumatera Utara, terutama itu arah ke Kisaran. Kami mengalami itu kemarin 2 hari yang lalu, mungkin sampai ke Lampung juga di daerah pinggir perkebunan sangat luar biasa. Ini kan terjadi apa, terjadi hal yang perlu kami dapatkan dari intelijen Ibu. Kami nggak mau *ujug-ujug* mafia, *ujug-ujug* penimbunan dan sebagainya.

Apa yang disampaikan Menteri Perdagangan kemarin bahwa ada mafia hari Senin akan kita jadikan tersangka, sampai hari ini pun tidak ada. Itu jangan jadi alasan, itu yang jadi persoalan. Kami paham ya, kami paham hari ini mesin bergerak baik manusia maupun mesin produksi, tapi pengawasan yang sesungguhnya yang kami inginkan adalah itu daerah ya, daerah pertambangan dan perkebunan. Itu sangat luar biasa. Kita tahu dan kita paham kita nggak, sangat memahami bahwa harus, harus solar ya, terutama solar ya yang di-*stop* di tengah laut juga kita paham ya. Nah, yang dari Ibu yang ingin tahu, di mana keberanian BPH Migas dalam konteks pengawasan ini.

Yang kedua, Pak Ketua, Pimpinan ya tentunya ya karena ada pergerakan ya kalau kuota 2018 ini realisasinya 15,5. 2019 16,23 dan 2022 ini ya ini ada pergerakan, pergerakan di daerah perkebunan, pergerakan daerah pertambangan dan juga manufaktur dan sebagainya, tentunya apa? Ini kan banyak membutuhkan dan cukup membutuhkan posisi kembali pada posisi 2019. Ada pergerakan tapi pertumbuhan saya belum, karena kita memang target. Target pertumbuhan 5,2 benar ya, targetan tapi kan baru masuk triwulan, triwulan pertama belum masuk kita, Pak. Nah, justru karena itu ya kalau memang terjadi pergeseran ini, kami ingin kembali pada tahun 2019.

Nah, yang kedua, persoalan makin melebarnya disparitas harga antara JPT solar dan JPU solar dan juga disparitas LPG PSO apa LPG non-PSO. Nah, disparitas ini ya kami juga semakin memahami ya. Kalau kita tilik terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi kita akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat*". Tapi persoalan, ada beberapa persoalan kandungan-kandungan tersebut kita sudah mulai besar ekspornya. Jadi, kandungan itu masih mengecil, makin lama makin mengecil di bumi kita. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi beban APBN kita, kalau di tahun '63 ya, '79 kita masih sebagai eksportir migas, sekarang kan kita kan importir yang sangat luar biasa.

Nah, kami melihat ya terhadap pergeseran-pergeseran ini yang membebani APBN ya, pergeseran harga ini kan sangat luar biasa tadi ada sampai kalau LPG sampai 7.800 eh 11.300 kalau JPU solar ke JPT solar itu 7.800. Nah, ini saya berharap ya Komisi VII pada saat menjelang pembahasan

APBN 2023 ke depan perlu mengantisipasi ini dalam hal ya, dalam hal terhadap sasaran-sasaran PSO yang sesungguhnya karena kalau dilakukan pembiaran, ini saya yakin negara tidak mampu untuk membebani ya disparitas ataupun subsidi terhadap APBN harus *clear* dalam persoalan segmen mana yang harus kita berikan. Kalau memang di sini kan jelas, dikatakan ada rumah tangga kalau LPG 3 kilo, rumah tangga, restoran, hotel, *laundry* dan sebagainya. Ini kan dikembalikan kepada dalam BPH Migas dalam konteks pengawasannya. Nah, kalau kami melihat pergeseran pendapatan masyarakat hari ini kan juga bergeser turun Pak. Nah, penegasan segmen ini tentunya rekomendasi Komisi VII untuk pembahasan APBN 2023 ini cukup signifikan di dalam menentukan berapa sih sesungguhnya subsidi ini. Apakah kita akan berikan sebagaimana apa yang telah berikan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar ada Rp153 triliun ya, 77 untuk migas. Saya pikir perlu ada kajian, tidak kajian 2-3 kali RDP tuntas, tentu ada tepat sasaran yang penting di sini.

Dan yang terakhir ya, saya juga ingin minta penjelasan kepada Ibu Dirut Pertamina ya, untuk biosolar Bu ya. Biosolar itu membebani Pertamina atau memang menguntungkan Pertamina sesungguhnya. Yang kedua, terhadap dana kompensasi yang dari tahun 2018 ke 2022 sekitar 100 triliun ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu ya, di dalam pembahasan APBN anggaran, di Badan Anggaran itu dana kompensasi itu sesungguhnya identik nggak dengan subsidi itu Bu. Karena, saya lihat kalau dana kompensasi itu juga merupakan beban daripada subsidi, beban APBN sementara subsidi yang 500 ya Bu per liter itu juga beban APBN. Jadi pertanyaannya, akankah ada dana kompensasi itu yang dikonversikan ke mana dia tuh, saya juga menjadi karena saya juga di sini baru 5 bulan ya belum paham saya, apa sih dana kompensasi itu? Kalau subsidi *clear*, tapi dana kompensasi itu yang hari ini membebani belum dibayarkan oleh negara melalui Menteri Keuangan ya kalau memang itu hanya beda-beda, tidak ada perbedaan signifikan kenapa tidak dibalik. Dana kompensasi, dana subsidi yang diperbesar dan kompensasi itu diperkecil, yang sesungguhnya kompensasi itu kami pertanyakan ke mana harus dikompensasikan.

Nah, ini pertanyaan yang terakhir kepada Ibu Dirut, sehingga *clear* bahwa subsidi versus, atau subsidi apakah identik dengan kompensasi atau kenapa tidak kompensasi, subsidi saja yang diperbesar, kenapa harus kompensasi yang diperbesar, ini pertanyaan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Nasril.

Jadi, semua sudah, anggota sudah memberikan pertanyaan, Pak Ketua jika ada yang ingin memberikan pertanyaan.

Silakan Pak.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat anggota Komisi VII, baik yang hadir langsung maupun melalui *zoom*,

Dan juga yang terhormat Pak Dirjen Migas,
Ibu Kepala BPH Migas,
Ibu Dirut Pertamina.

Ya, memang *problem*-nya sungguh luar biasa karena ada beberapa sebab ini memang. Kalau, saya melihat ada persoalan yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, tampaknya. Jangka pendek pasti kita akan ikut membantu menuntaskan *cashflow*-nya Pertamina, kalau tidak itu bisa berat. Jangka menengah kita akan tinjau kembali persoalan mekanisme subsidi itu bagaimana. Memang, ini menjadi persoalan. Apakah subsidi barang atau subsidi orang karena kalau selama ini subsidi barang terjadi disparitas barang, pasti terjadi juga persoalan-persoalan dipelaksanaannya. Jadi, pasti terjadi distorsi istilahnya secara ekonomi. Jangka panjang pasti ya memang fosil kesimpulan kita sudah di masalah di kita. Kita harus segera masuk ke energi baru terbarukan Pak Dirjen. Jadi, fosil kita tahu sendiri minyak, gas dan batu bara yang sudah menjadi komoditas, yang itu terombang-ambing oleh harga dunia, di mana kita juga sudah sangat terbatas. Saya kira Pak Dirjen tahu kita pernah riset, kita kurang lebih 23 miliar barel, hari ini tinggal 2,8 miliar barel saja, dan seterusnya, seterusnya di minyak. Demikian juga di gas akan segera habis di tahun berapa, terlebih dan juga batu bara. Terlebih bahwa ini adalah menjadi komoditas dunia yang kita terombang-ambing. Kita saya kira itulah penyelesaian jangka panjangnya.

Jangka pendeknya tadi kita akan *support* juga bagaimana menyelesaikan persoalan *cashflow*-nya Pertamina dengan segera mendorong pemerintah untuk segera tanggung jawabnya dilaksanakan. Saya kira betul tadi pertanyaan Pak Nasril, itu kompensasi atau subsidi sejumlah, kalau menurut saya subsidi itu kan *carry over* per tahun 2018 atau 2019 yang dibayar tidak lunas per tahun kan begitu. Kayak misalnya kalau kita lihat subsidi ditetapkan di APBN 2022 ini adalah kalau tidak salah di migas 77 triliun kurang lebih 76 koma sekian triliun. Sementara, di PLN atau listrik kurang lebih 57 triliun. Jadi, totalnya ada 134 triliun kurang lebih. Nah, itu biasanya tidak dibayar tuntas per anggaran tahun ini, lantas di-*carry over* jumlahnya ada segitu kurang lebih begitu ya Bu Dirut ya. Tolong nanti juga sebagaimana juga pertanyaan Pak Nasril tadi.

Nah, menjadi jelas di gas, sementara solar itu sebetulnya solar subsidi yang 15 juta kilo liter, yang nonsubsidi berapa Bu?

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

..(suara tidak jelas) 14 juta kilo liter, itu yang kebanyakan untuk industri.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Yang industri 14 juta kilo liter.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

14 juta kilo liter setahun.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Setahun yang subsidi.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Yang subsidi 15.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

15 iya, inilah lagi-lagi *problem*-nya terjadi disparitas harga yang luar biasa, sebagaimana juga di gas kan gitu Bu. Hari ini gas sudah tadi di APBN kita ditetapkan 535, dengan gas subsidiya adalah eh maaf 8 juta metrik ton itu adalah mencakup 92% dari total gas. Nah, inilah jadi *problem-problem*, memang.

Jadi, Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, saya kira kita terus-menerus perlu mencermati betul mekanisme subsidi ini. Idealnya memang ketika masyarakat kemampuan daya belinya sudah cukup ya tidak perlu subsidi. Sehingga, barang dibiarkan untuk mencapai titik ekuilibrium-nya mencapai harga yang ideal antara *supply*, *demand* dan produksi dan *input* harga dan seterusnya. Sekali lagi di saat kita memang sudah mampu secara ekonomi tetapi karena kita ada yang masih miskin, maka itulah keadaan subsidi masih sangat dibutuhkan.

Jadi, saya hanya menggarisbawahi beberapa hal Ibu/Bapak yang terhormat. Jadi, kita beberapa hal memang harus kita segera selesaikan. Yakni adalah tentang pemerintah harus menjalankan kewajibannya, kalau tidak ya akan katakanlah *collapse* Pertamina gitu Pimpinan. Jadi, kemungkinan nanti sudah sebagian besar juga sudah masuk di sini pendapatnya bahwa pemerintah harus segera menjalankan kewajibannya dengan membayar kewajibannya sejumlah kurang lebih 100 triliun dan sebetulnya 100 triliun itu juga hanya sebatas tahan kurang lebih 2 bulan saja itu, gitu loh. Itu kan ini menjadi persoalan kalau persoalannya juga persoalan utamanya kan antara harga produksi dengan apa yang dijual kan tidakimbang. Bayangkan dengan *crude* hari ini yang harga sampai ICP sudah menyentuh 114 ternyata Pak Dirjen ya, saya baru tahu hari ini tanah kan yang lalu kan masih 98, ternyata sudah 114 dan itulah yang dibayar Pertamina milik bagian pemerintah kan begitu. *Crude* jatah pemerintah itu yang dibayar Pertamina, sementara diproduksi lantas dijual dengan harga yang sangat rendah ya bagaimana enggak babak-belur kan begitu.

Nah, saya kira ini persoalan harga, mungkin memang kalau hari ini menaikkan harga sekarang apalagi menjelang hari raya dan juga apa daya beli masih ini, masih beratlah rasanya kalau menaikkan harga BBM. Tapi *problem*-nya di situ celakanya, celakanya antara harga produksi, lah *crude*-nya aja, padahal *crude*-nya itu menyangkut 90% lebih ya dari komponen harga BBM. Bayangkan hari ini *crude*, ICP-nya ini harga *crude* dalam negeri itu sudah 114 karena kan harus impor juga *crude* maupun produk. Jadi, ya memang *megap-megap* hampir nggak rasional sebetulnya. Ini istilahnya seolah-olah ini tanggung jawab negara dipikul saja, dipikul oleh Pertamina kan nggak *fair* situasi kayak begini. Ini bukan membela Pertamina. Ini kan kita memang, ya kalau membela juga nggak apa-apa toh gitu, harus dibela, wajib.

Jadi, memang kondisi ini memprihatinkan kita semuanya, kita tahu kok sebetulnya kalau dikalkulasi ada juga *windfall profit* kok oleh pemerintah dengan harga komoditas yang naik berlipat-lipat. Nikel sampai hari ini sampai 38 ribu dolar per ton misalnya. Padahal, harga rata-rata biasanya ya 7 sampai 8 dan seterusnya. Harga komoditas semuanya naik, sehingga juga ada *windfall profit* juga. Batu bara bayangkan saja menyentuh harga 400 dolar bahkan untuk GAR tinggi. Untung nah ini kan untung saja, Komisi VII *kekeuh* dengan DMO (*Domestic Market Obligation*) di batu bara, kalau tidak PLN bisa mohon maaf *megap-megap* juga karena apa? GAR 3200, 3600 maaf 4200, 4600 yang dipakai PLN hari ini harganya 330. Sementara di harga DMO kita patok 70 dolar saja, sehingga PLN masih bisa memproduksi per kilo watt jam 915 sen dolar saja. Bayangkan kalau harganya 330, itu artinya dari 70 ke 330 kan lipet 5 itu ya, bisa-bisa. Nah, inilah situasi yang menurut hemat kita harus juga kita cermati bersama. Sebaliknya juga Pertamina dari awal sudah kita ingatkan pemerintah itu harus ada DMO (*Domestic Market Obligation*) untuk CPO kalau tidak seperti hari ini, bahkan ada yang menuduh saya sempat di stasiun TV agak berantem sedikit sama pengamat ekonomi karena seolah-olah yang membuat susah ini semua susah adalah karena CPO dibuat untuk biodiesel yang B30 itu, padahal justru B30 atau B20 dulu yang menolong CPO kan begitu, ketika harga itu sangat rendah waktu itu dan juga secara proporsi kan tidak, karena tidak di DMO sehingga ketika terjadi harga tinggi di luar semua ke ekspor sebagian besar.

Inilah kalau tidak Bu Nicke, Pertamina harus punya kebon kelapa sawit ya nggak apa-apa, itu kan sebagaimana di hulu kita punya blok, ada blok Rokan, ada blok Cepu. Kebon kelapa sawitnya Pertamina untuk memproduksi B30, B100 bahkan, ya kalau memang itu menjadi kebutuhan karena kita semua harus *inline* juga dengan target besar kita. Kita sudah menandatangani *Paris Agreement* kan begitu, kita mau menekan juga karbon serendah-rendahnya di mana B30 telah menekan karbon sampai 21 ribu, betul, 21 juta ton karbon. Ini kan artinya ya *oke* juga gitu, semua harus *inline* ke sana, kok saya jadi ngelantur ke mana-mana, nggak fokus juga, entah mau apa yang kita bicarakan, malah kita jadi ceramah, jadi EBT gitu loh. Jadi, oke ya karena kita bulan G20 presidensi ya, kita juga artinya hal-hal yang itu menjadi perhatian itu.

Itu Pak Pimpinan, saya tidak menggarisbawahi apa-apa tapi kita hanya mengeksplorasi banyak hal saja.

Terima kasih kembali ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ketua.

Sebelumnya saya perpanjang dulu ya waktunya 30 menit setuju? Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Demikian tanggapan dari teman-teman, rekan-rekan Komisi VII. Jadi, intinya kita mendukung agar keberlangsungan Pertamina sebagai entitas yang memang memegang peran vital dan menyediakan BBM untuk seluruh negeri ini bisa dilaksanakan. Jadi, salah satu dukungan kuat itu nanti akan kami tuangkan di dalam kesimpulan supaya nanti Ibu Emma CFO tidak terlalu pucat lagi. Pak Alfian juga *crude*-nya jangan bertambah dan Pak Mul tadi saya perhatikan saking stresnya kerjanya ngemil terus tadi Pak.

Kami persilakan Pak Dirjen, Ibu Kepala BPH Migas dan Ibu Direktur Utama Pertamina untuk memberikan jawaban. Singkat saja Pak nanti detailnya bisa disampaikan secara tertulis.

Kami persilakan, Pak.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat,

Pada prinsipnya, apa yang disampaikan dari seluruh anggota, masukan-masukan tadi kami dapat menyetujui Pak untuk secara prinsip maupun hal-hal yang perlu kita lakukan. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa pentingnya pasokan pada dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat dan kami bertiga sebenarnya sudah mempunyai grup bersama dan sudah ada juga tim. SK tim dari Pak Menteri untuk menjalankan bertiga ini tim pengawasan gugus tugas untuk ke lapangan. Dan perlu ditekankan adalah penindakan dan kami juga sudah menggalang PPNS yang kita punyai, kita akan kerja samakan dengan Polri dalam hal ini bersama BPH dan Pertamina.

Kemudian tadi disampaikan tentang neraca LG saya kira juga kami, sebenarnya kami punya untuk beberapa jenis energi, seperti gas, minyak tersendiri tapi di sini adalah..(*suara tidak jelas*)..neraca LG secara keseluruhan ya per daerah saya kira itu akan perlu. Kita gas punya neraca energi untuk per daerah, per provinsi kita ada. Jadi, kita tahu persis apakah daerah Jawa Timur

yang sekarang *shortage* dan sebagainya kita memahami hal itu, Sumatera Utara juga demikian. Ini akan kita *copy* untuk jawaban yang di sini.

Itu adalah hal penting yang kami sampaikan, tadi semua masukan saya kira kami akan laksanakan dengan baik, di antaranya cadangan operasional, form marka dasar dan penerapan pengawasan. Pertamina punya sistem MyPertamina. Saya kira itu akan dilakukan dengan pilot sesegera mungkin. Ini akan kami dukung untuk melakukan pilot MyPertamina di Jakarta dulu supaya tahu hasilnya karena kita memahami bahwa data yang dipunyai oleh Kemensos DTKS juga perlu kita verifikasi dan ternyata datanya juga tidak begitu menggembirakan. Dari 116.000 yang diterima oleh Pertamina setelah dicek tidak bisa langsung kita pakai. Jadi, kita akan mulai dengan langsung pilot saja, pilot kemudian sekalian diverifikasi data-data tersebut.

Saya kira itu yang paling penting, Pak.

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Baik.

Terima kasih.

Kami dari BPH Migas mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari para Anggota Dewan dan juga dari Pimpinan, tentu itu sangat membantu mengingatkan kami gitu, bagaimana kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami dengan baik.

Mungkin saya akan menjawab secara umum saja yang terkait disampaikan Bu Mercy mengenai kuota minyak tanah Ibu seperti pernah saya sampaikan bahwa kami melakukan evaluasi triwulanan dan saat ini memang itu sedang kami evaluasi, mungkin dalam 1 sampai 2 hari sudah ada hasilnya Bu mudah-mudahan, untuk kuota, untuk penyesuaian kuota.

Kemudian tadi sempat ditanyakan Pak Ramson mengenai pertumbuhan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, izin interaktif sebentar sebelum jawaban ke Bapak/Ibu yang lain.

Saya hanya ingin ingin memastikan saja bahwa dari hasil evaluasi itu Maluku harus naik, Bu. Saya minta maaf banget itu kalau dia sama aja mungkin masih masuk akal ya, tapi kalau tambah turun lagi ini sudah langka, langka sekali di semua tempat itu antri dengan apa gen dan segala macam, saya sudah hampir nggak mau foto-foto lagi Bu. Dulu itu Pak Ivan foto terus, saya kirim terus.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Terima kasih Bu, kami akan perhatikan.

Kemudian yang mengenai pertumbuhan ekonomi yang tadi ditanyakan Pak Ramson. Dulu kami memang menggunakan angka 3,5% pada saat itu kan disusunnya itu pada awal tahun 2021 begitu ya, di mana tahun 2020 kan pertumbuhannya minus gitu ya, kemudian di awal 2021 sampai ..(*suara tidak jelas*).. pertumbuhan ekonominya memang 3,5%. Kemudian angka 4,5 sampai 5,5 itu kan baru saja ya diumumkan gitu kan oleh Menteri Keuangan di bulan Februari kemarin, bahwa memang ada peningkatan gitu, ada koreksi terhadap angka pertumbuhan ekonomi seperti itu Pak Ramson. Mungkin nanti secara detail kami sampaikan secara tertulis.

Kemudian secara umum yang terkait dengan tuis kami. Memang kami akan mengadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Yang pertama untuk pengaturan-pengaturan seperti disampaikan Bu Dirut tadi. Mungkin memang ada aturan yang harus kita perjelas gitu ya seperti di konsumen pengguna di dalam lampiran Perpres itu mungkin banyak yang abu-abu begitu. Nah, itu yang akan kita revisi supaya dalam implementasinya tidak membingungkan begitu. Jadi, itu yang akan kita lakukan, kemudian jika kita akan melakukan revisi atas SK pengendalian terkait dengan jumlah *volume* yang boleh dikonsumsi oleh beberapa kategori transportasi, khususnya transportasi darat. Kemudian juga kami juga sedang membahas ya dengan beberapa instansi, misalnya dengan KKP bagaimana kita akan mengatur rekomendasi terkait dengan nelayan misalnya seperti itu. Itu juga sedang kami bahas jadi memang beberapa aturan sedang kami evaluasi dan akan kami terbitkan revisinya untuk mempermudah operasionalnya.

Kemudian juga yang terkait dengan pengawasan, kami juga seperti disampaikan Pak Dirjen Migas tadi sedang meningkatkan pengawasan, terutama memberdayakan PPNS Pak. Jadi, PPNS kami itu ada sekitar 30 orang yang memang terus terang saat ini belum begitu berfungsi. Nah, ini kami lakukan penyegaran-penyegaran dan juga kerja sama dengan Polri dan kemarin tugas pertama PPNS yang ke Sumatera Selatan. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga tentu saja penindakan-penindakan juga kami galakkan. Kami laporkan juga bahwa sesungguhnya setiap hari itu ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran penyalahgunaan yang dilaporkan oleh pihak kepolisian kepada kami dan meminta kami menjadi saksi ahli begitu ya. Setiap hari ada sekitar 3 atau 4 begitu permintaan untuk menjadi saksi ahli di kasus penyalahgunaan BBM. Jadi cukup banyak memang terjadi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, izin.

Ini ada datanya enggak Bu, berapa yang sudah pidana, penjara, pencabutan izin maksudnya ada tindakannya.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya, kami menjadi saksi ahli itu ada juga Bu nanti kami sampaikan datanya. Jadi, itu yang kami lakukan dan tentu saja akan terus-menerus menggalakkan, meningkatkan pengawasan di lapangan.

Nah, mungkin itu jawaban secara umum.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan, sedikit.

Jadi, kalau BPH nggak pernah buat laporan ya, laporan polisi gitu.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Maksudnya gimana, Pak?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kalau ada kejadian yang dilihat oleh BPH, jadi BPH jadi ahli aja.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Bukan, jadi gini kami kan bekerja sama dengan polisi ya. Nah, polisi itu kan mereka secara operasional setiap hari ada di lapangan begitu ya. Pada saat mereka misalnya melakukan penangkapan contohnya misalnya pada.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Bukan, yang BPH aja Bu, yang BPH. Saya nanya BPH dulu. Kan BPH ini ditugasi oleh negara, tugas dan fungsi Anda mengawasi regulasi ini.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Betul.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, apa yang dilakukan.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Tentu saja kami melakukan pengawasan rutin, kemudian melakukan pengawasan yang bersama-sama dengan kepolisian, pengawasan bersama-sama dengan tim gugus tugas.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak Bu, kalau polisi kan nggak ada mengawasi, kalau dia melihat kejadian kan langsung dia tangkap.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Betul, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, yang saya tanya sekarang, apa yang anda lakukan sebagai BPH gitu loh. Ini kan tiap hari ada kejadian. Nah, harusnya BPH membuat laporan ke polisi gitu loh.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Maksudnya yang kita temukan, kami melaporkan kepada polisi Pak. Tetapi kalau misalnya polisi yang menemukan begitu kan, biasanya mereka akan meminta kami untuk menjadi saksi ahli dalam apa namanya penyelesaian kasus itu, gitu Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Daftar seluruh kegiatan Pertamina kan Ibu tahu, kan BPH tahu nih daftar kegiatan, seluruh kegiatan yang dipantau oleh Pertamina. Regulasi yang disalurkan oleh Pertamina itu kan ada, seperti di Palembang keluar dari depo itu aja, itu ada penampungan solar yang dilakukan oleh ..(*suara tidak jelas*)..itu aja nggak ada laporannya sampai sekarang.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi, setiap bulan itu kami melakukan untuk JPT ini verifikasi ya Pak, itu yang disampaikan ke Kementerian Keuangan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Atau izin, Pimpinan

Mungkin di dalam kesimpulan nanti kita minta BPH setiap bulan memberikan laporan ke Komisi VII tentang laporan kegiatan yang dilakukan oleh BPH ini gitu aja. Jadi, seperti kita minta laporan perbankan waktu itu Komisi XI. Itu kan per bulan kan diberikan laporan ke kita. Nah, saya minta BPH ini memberikan laporan ke seluruh anggota setiap bulan, apa yang mereka lakukan tentang kegiatan yang terjadi di regulasi Pertamina maupun izin-izin yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen. Nah, sekarang kan banyak *crude* yang dicuri menjadi solar, harusnya kan itu udah ditangkap oleh BPH Migas siapa pelaku-pelakunya gitu, dilaporkan. Jadi, laporan itu kita tahu siapa nama pelakunya gitu. Saya minta gitu Pimpinan di dalam kesimpulan nanti kita sampaikan.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Iya, terima kasih.

Jadi, mungkin itu sementara dari kami nanti jawaban detail akan disampaikan secara tertulis.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dilanjutkan Ibu Dirut Pertamina.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Baik.

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Tadi sudah banyak masukan dan saya juga terima kasih tadi beberapa usulan sudah direspon secara positif, baik oleh Dirjen Migas maupun oleh Kepala BPG Migas.

Mungkin, saya hanya menambahkan beberapa hal saja Pak, yang tadi pertanyaan ada beberapa kaitannya dengan biosolar. Apakah ini membebani atau bagaimana. Jadi, penggantian dari pemerintah untuk biosolar itu ada 2, satu ada dalam bentuk subsidi tetap, yang kedua adalah selisih sisanya itu adalah bentuk kompensasi. Nah, kalau kita lihat subsidi tetap ini, ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi, sebagai gambaran tahun 2020 ketika ICP APBN itu adalah 40 dolar, subsidi tetapnya itu adalah Rp1.000,- Pak. Jadi, kalau sekarang dengan asumsi APBN 63 apalagi kemudian realisasinya jauh lebih besar, maka angka subsidi tetap itu tidak cukup. Nah, yang sisanya yang, jadi kalau sekarang kan selisihnya kan 7.800 maka yang 500 adalah subsidi tetap yang sisanya 7.300 adalah kompensasi. Kompensasi ini memerlukan perhitungan tersendiri oleh auditor yang nanti kemudian menurut Perpres dikatakan bahwa kompensasi akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Nah, ini yang akhirnya kemudian pembayarannya seringkali melewati tahun, yang *multiyears*. Ada dua dampaknya, yang pertama adalah bentuknya tentunya ke *cashflow* karena atau selisih itu kan Pertamina *spending* semuanya secara *cashflow*. Yang kedua adalah dia *profit and loss* karena pembayaran yang terlambat itu menurut akuntansi, maka Pertamina terkena beban yang namanya *time value of money*. Tahun lalu pun *time value money* itu sekitar 900 juta yang langsung menggerus *profit and loss*. Jadi, kena di *cashflow*, kena juga di *profit and loss*. Itu gambarannya, nah kalau boleh yang kami usulkan adalah komposisi subsidi tetapnya dinaikkan karena ini kan langsung bisa membantu *cashflow* Pertamina. Misalnya 70% itu, yang 30%-nya adalah kompensasi yang akan dihitung kemudian dan..(*suara tidak jelas*)...

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Izin, Pimpinan.

Bu tadi kan 7.300 itu kompensasi. Nah, selama ini, selama ini setelah di audit ya itu ada penyimpangan lagi nggak atau ada pengurangan atau penambahan lagi nggak yang 7.300 itu atau memang segitu angkanya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Ya tentu ada *adjustment* yang dilakukan. Jadi, kaitannya yang pertama tentu melihat kuotanya berapa, kalau sampai melebihi kuota tentu ini kan juga berdampak terhadap keuangan negara kan, Pak. Jadi, di situ ada kesepakatan nanti 3 menteri, Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk menyepakati berapa angka kompensasi yang akan dibayar kepada Pertamina dan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus dalam satu tahun, *multiyears* gitu Pak. Itu yang menimbulkan *cashflow*, kemudian *profit and loss* itu adalah *time value money* begitu Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya terima kasih Pimpinan.

Saya pikir khususnya ini kita punya sesi khusus ya untuk membahas kompensasi ini apakah perlu diturunkan, sehingga subsidiya dinaikkan, ini khusus sesi ini.

Terima kasih, Pimpinan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit interupsi, Pak Ketua.

Bu Dirut itu B30 itu sekarang dari total *volume* solar yang dijual oleh Pertamina itu berapa puluh persen B30.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Kalau solar subsidi sekarang kan komposisinya adalah 92% Pak, iya karena itu kan solar subsidi biosolar ya 92%. Sedangkan yang sisanya itu adalah dextrite dan pertadex itu 8%, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

CPO yang meningkat bagaimana ini ke Pertamina, apa tetap harga subsidi atau harga *market*.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi, mekanismenya adalah FAME yang kita beli itu adalah maksimum sama dengan harga solar, Pak. Jika masih ada selisih, misalnya lebih mahal

harga FAME-nya maka itu di pengusahanya diganti atau disubsidi dari dana BPDPKS Pak, dana sawit. Jadi, kalau Pertamina membeli seharga solar maksimum, jadi ketika harga solar naik ya otomatis kita pun membeli FAME-nya ya seharga solar itu Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Selama ini gimana, terakhir ini.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Sama seperti itu karena ketentuannya seperti itu, ketentuan di ESDM seperti itu Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tapi kalau realitasnya harganya udah lebih tinggi ya Bu ya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Karena dipatoknya Pertamina-nya membeli seharga solar Pak maksimum, selisihnya itu ditutup dari dana yang BPDPKS itu.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Dipungut oleh pemerintah ya yang dari ekspor.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya dana sawit betul, yang dari ekspor itu yang menutup. Jadi, itu kan jadi seolah-olah FAME itu ada harga DMO maksimum sebesar harga solar, selisihnya ditutup dari BPDPKS.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi, harga solar yang sudah berbentuk BBM ya, bukan untuk yang diolah ya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Produk, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Produk ya.

Terima kasih Bu Dirut.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi solar CN48.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih, Pak Ketua.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, kalau boleh sedikit menambahkan saja, ini soal apa namanya subsidi solar. Kita udah berapa tahun ya periode kemarin kan masih 1000 kan, kemudian turun menjadi 500 ya dengan asumsi bahwa angka kemiskinan turun secara bertahap, pertumbuhan ekonomi naik juga secara bertahap. Ternyata kan ada faktor-faktor variabel x yang cukup parah dengan Covid dan juga di tingkat global kayak begini. Terhadap kalau kita bicara hari ini kita bicara bareng udah enggak masuk akal nih Pak Ketua, dari tadi saya udah mau senyum aja. Kasih Rp500,-ini juga udah nggak ngaruh sebenarnya, kan udah melampaui apa namanya angka-angka *threshold*-nya untuk masyarakat miskin ini gitu loh. Ini udah jauh berkali-kali lipat, dikasih Rp500,- juga udah nggak ngaruh sesungguhnya. Jadi, ini memang Pertamina ini harus kita bantu Pak Ketua bagaimana solusinya, tapi itu yang tadi coba saya tawarkan ya. Kita harus duduk bersama dan ini kalau bisa rapat kerja yang agak detail gitu loh, untuk melihat seluruh neraca keuangan kita, bukan neraca keuangan, neraca energi kita hari ini, termasuk angka-angka subsidi ini harus detail.

Jadi, kalau kita naikkan subsidi solar ini juga akan berpengaruh juga terhadap keuangan, keseluruhan subsidi energi gitu loh. Total subsidi energi yang kita mau tawarkan dari Komisi VII ini berapa banyak tambahan apa namanya selisihnya ini naik ke atas gitu loh dengan pendapatan yang jatuh. Kemudian, juga kita masih memaksakan untuk tetap mempertahankan ada anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional, di luar kita mempertimbangkan rasio *depth ratio* kita gitu loh.

Jadi, Pak Ketua, ini saya pikir mungkin kita rapat kerja yang detail Pak Ketua. Jadi, nggak bisa yang ngawang-ngawang kayak gini lagi, hitung-hitungannya benar gitu loh. Jadi, kita pada akhirnya bisa dapat angka-angka yang rasional, naik berapa ratus rupiah untuk BBM, gas dan BBM yang lainnya. Misalnya, itu juga mungkin kita bisa hitung-hitungan juga gitu loh, karena ini juga akan berdampak panjang ke listrik, ke mana-mana ini, kalau kita bicara ini kan kita bicara subsidi energi secara keseluruhan Ketua, nggak bisa sepenggal-sepenggal kayak begini nih.

KETUA RAPAT:

Nah, itulah untuk listrik kan tetap dengan harga 6 dolar per MMBTU begitu Pak Dirjen, itu kan harga subsidi juga ini celakanya, enak bener PLN ini juga.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, tapi karena subsidiya kan masih hitung-hitungan Pak terhadap nilai tukar rupiah dan *crude* juga kan. Jadi, mungkin kita juga apa namanya bisa, bisa detailkan semuanya juga, Pak Ketua. Kemarin kan untuk subsidi listrik dari 40 sekian naik 50 sekian ya, 50 sekian turun 40 sekian ya, 63 turun berapa 57 ya karena selisih apa namanya nilai tukar dan harga *crude* pada saat itu. Ini kan semua berpengaruh panjang ini semua ke mana-mana ini, mungkin itu saja tawaran saya dari tadi ini, saya masih agak gelisah gitu.

Terima kasih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Sedikit Pimpinan, Bu saya mau tanya modal FAME tadi berapa belinya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Seharga solar aja Pak, harga solar.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah terus setelah ditambahkan oleh pemerintah tadi selisihnya berapa jadinya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Izin, harus dilihat ya Pak, berapa harga pasarnya. Pertamina membeli seharga solarnya selisihnya yang diberikan kepada pengusaha.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, SH.):

Iya, tapi kan penjual tetap menerima harga pasar kan, berapa jadinya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Mungkin Pak Dirjen Migas karena yang menetapkan, memberikan itunya di situ. Bisa disampaikan Pak, mohon maaf.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Per hari ini aja berapa, berapa, gimana cek-cek ini, ini hari tiap hari kerjanya. Berapa Pak Dirjen?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Kalau JPT solar formulanya sekarang kemarin sedang dievaluasi.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak setelah ditambahkan BPDPKS ya, berapa duitnya itu, setelah digabung berapa harga pasar. Pembeli itu menerimanya, penjual itu berapa menerimanya, penjual FAME itu, terima uangnya berapa, solarnya berapa per liter, setelah jadi solar berapa kita jual.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Itu yang solar subsidiya, solar subsidi itu 5.150, Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya itu FAME setelah dikelola dengan *crude* ya.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Jadi FAME-nya sendiri tadi harga..(*suara tidak jelas*).. ribu.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak teknisnya tolong dijelaskan Bu, FAME tadi harganya 15 sekian dicampur dengan solar, jadi B30. Berapa harga B30 ini?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Harga jualnya kan harga jual ini Pak, dipatok gitu Pak Rp5.150,- itu harga biosolar yang ada di SPBU-SPBU itu. Jadi, selisihnya dengan harga ekonom sangat tinggi memang.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, terus berapa subsidi pemerintah jadinya, sebenarnya.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Nah itu, yang tadi sudah dipaparkan Pak ya, jadi selisihnya ya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kan gede itu.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Rp7.800,- per liter.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Berapa besar FAME ini kita beli.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Jumlahnya 8 juta Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Per?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Per tahun, per kilo liter per tahun.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Per bulan berapa Pak?.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

1 juta lebih ya, 1 koma sekian, oh *sorry* 0,9.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

8 juta kan bagi bagi 12 bulan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Oh betul, 0,75.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, ini kan kerjanya sebenarnya rugi gitu loh, kalau kita beli *crude* yang dari luar kan mana lebih untung gitu loh. Kan tadi ada *crude* tadi yang lebih murah yang bisa diproduksi kilang kita, mana yang lebih bagus gitu daripada ngerjain FAME ini. Ini kan kerjaan bohong-bohongan jadinya, bener ini Pak Dirjen, ini kan aneh. Orang kerjaan nggak jelas kok.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Ini keputusan pemerintah.

KETUA RAPAT:

Begini, mungkin saya bisa sedikit menjembatani. Jadi, memang itu faktanya. Faktanya kenapa menjadi rugi karena harga *crude*-nya tinggi sekali sekarang, solar itu tinggi. Sehingga selisihnya menjadi 7000 tadi, dengan solar, 100% solar nggak pake FAME pun harga 5.150 pun itu nombok Pak Nasir, gitu loh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Betul, kan hari ini Ketua, ini kan ceritanya hari ini. Kalau nanti nggak perang ini kan turun lagi, kalau nggak perang ini kerjaan kenapa dikerjain gitu loh. Kalau begini ceritanya kan aneh juga gitu loh, saya juga nggak ngerti jadinya. Maksud saya, coba buat rapat yang khusus, kita mau lihat ini kilang-kilang yang punya Pertamina ini apa sih golongan *crude*-nya, berapa harga *crude*-nya masing-masing gitu. Ini biar *clear* gitu, kalau ada yang untung ngapain sampai kerjain yang rugi gitu loh. Ini udah tenggelem minum air, *dijek-jekin* terus, matilah lama-lama. Ini swasta kalau nggak ada subsidiya udah bangkrut ini Pertamina, tapi kan ini masyarakat harus kita pikirkan dan Pertamina juga harus kita pikirkan, Ketua.

Nah, kalau urusannya FAME-nya ini tadi udah harganya sekian, dibeli lagi tambah uang dari BPDPKS. Nah, udah 15.000 sekian. Nah, dijual cuman disubsidi jadinya cuman 5000 sekian, bukan 7000 sekian Bu. Bagi-bagilah barang itu iya kan 9 ribu semua bukan 7 ribu sekian. Nah, jadi kan kalau subsidiya segede ini kan, kalau ada yang lebih bagus kenapa nggak cari yang lebih bagus gitu loh. Ini saya nggak tahu juga kok FAME-FAME lagi, kalau seharusnya kita itu membuat teknologi FAME dijadikan solar, harganya lebih murah dan bisa bergaul buat masyarakat gitu loh. Ini agak aneh sih menurut saya apa kalau nggak dibentuk panja saja biar jelas barang ini gitu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ketua.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Oh Ibu mau tambah ya, silakan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Nggak, maksudnya menindaklanjuti dari yang ada ini aja.

Jadi, saya usul mungkin, langkah yang pertama kita coba memastikan bahwa pengembalian utang yang 100T, itu menjadi langkah pertama kita Komisi VII dengan semua jajaran. Langkah yang keduanya, kan ini hitung-hitungannya agak detail. Kita duduk bersama baru keluar dengan formula yang tepat ke Badan Anggaran berapa tambahan-tambahan yang rasional disesuaikan dengan kondisi keuangan kita hari ini.

Mungkin itu usul konkritnya, Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Sebenarnya kalau kita ambil seribu perak saja dari impor BBM ya Pak, pokoknya seluruh impor BBM itu lewat Pertamina ngambilnya, dia ambil 1000 perak, dia udah dapet 1 bulan 2 triliun lebih sudah membantu Pertamina, seribu perak aja karena saya lihat tadi hampir 2 juta ini 1 bulan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Solar maksudnya ya, Pak ya, solar maksud Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Solar impor.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Ya, solar impor. Pertamina itu punya misi, punya ini ya, dia tidak ..(*suara tidak jelas*)..

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Punya keinginanlah ya. Nah, saya lihat tadi di situ. Nah kalau dia Pertamina ini udah habis kalau ibarat apa diperah susunya diperah susu tambah kacau ini barang, nggak jelas lagi saya lihatnya. Saya menurut saya ada panjalah biar panja ini yang menjelaskan semua regulasi ini, buat ajalah Panja FAME ini lebih bagus biar *clear*. Saya melihatnya agak aneh sih.

KETUA RAPAT:

Iya begini, begini mungkin begini, ini baik FAME maupun solar semuanya naik itu loh persoalannya sementara harga jualnya tetap 5.150 itu yang jadi masalah.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Itu yang jadi masalah sehingga inilah yang mau kita pecahkan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Setuju, cuma kan.

KETUA RAPAT:

Mau solar solar 100% pun itu tetap hari ini ya nggak *nyandak* harga 5.150 kan begitu. FAME juga campurannya itu ya sudah naik gitu loh, nanti dibahas di Panja Migas.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Begini Pimpinan, saya ingin minta penjelasan Ibu yang belum dijawab ya. Dengan B20, B30 dan seterusnya itu menguntungkan Pertamina atau menjadi beban karena kalau kita *flashback* ke belakang ya Bu ya, semenjak keluarnya Perpres 61, 16, 61/2016 tentang BPDPKS ya. Pada waktu itu kan harga TBS ya, harga TBS itu lebih mahal upah dodos daripada harga jual sawit, maka berkembanglah bio waktu itu 2016. Lebih mahal upah dodos daripada harga sawitnya, itulah *asbabun nuzul*-nya waktu itu 2016.

Nah, pada hari ini ya ketika minyak goreng langka dan antriannya sangat luar biasa, disalahkan Pertamina oleh para pengusaha produsen sawit. Kami harus memberikan pasokan yang sangat luar biasa dan besar kepada Pertamina kan gitu. Sekarang kita balik, saya sepakat apa yang dikatakan saudaraku Nasir tadi, kita balik. Seingat saya, beberapa diskusi kita dengan Pertamina menjadi beban biodiesel B30 pada Pertamina, bukan lebih menguntungkan, apa benar apa tidak?

Itu yang minta penjelasan, terima kasih.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya Pak, jadi ketika program biodiesel ini digulirkan ini kan harga CPO-nya rendah, sehingga waktu itu kami memang bisa menurunkan HPP, ongkos produksi. Tapi kalau hari ini dengan harga sawit yang tinggi, ini tentu menjadi berat, Pak. Belum lagi kalau kita menyalurkannya bukan B30 tapi B0 misalnya, ada *supply* yang terlambat atau apa, kami didenda oleh pemerintah, harus bayar denda, kalau tidak membayar B30.

Jadi, barangkali kalau yang ini usulan kita dulu Pak, ada DMO Pak, harganya di *pack* baru itu kemudian akan menjadi lebih baik B30 itu. Tapi kalau dilakukannya sesuai harga pasar ya mau B30 atau B0, artinya 100% solar ya hari ini sama saja, Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Soal B30 ini sebenarnya ini perintah pemegang saham ke Pertamina, kita nggak bisa ganggu-ganggu karena Bu Dirut harus taat terhadap pemegang saham. Sebentar dulu Pak Nasir, harus taat, cuman kita yang bisa mengambil solusi.

Sekarang untuk rapat ini kita minta kira-kira keinginannya Bu Dirut yang kita buat dalam keputusan politik apa nih, yang bisa membantu operasi Pertamina menghadapi goncangan sekarang, nanti langsung kita bahas di sini bisa menjadi bagian dari keputusan itu saja supaya konkrit. Nanti yang selanjutnya kita bisa undang di rapat berikutnya, bentuk apa, bentuk apa terserah kita, kita bisa memutuskan di parlemen ini, orang mau mundur, mau maju Pemilu juga diputuskan di parlemen dari zaman dulu ya, dari zaman dulu maksud saya.

Jadi itu saja, tolong Bu Dirut jelaskan dulu apa yang diinginkan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Nggak begini Bu intinya di sini kita minta keterbukaan Pertamina, jangan dtutup-tutupin gitu loh. Saya nggak ngerti ya waktu harga normal juga Pertamina ngeluh tentang pengelolaan FAME ini. Jadi, ini sih beban sama yang disampaikan Pak Ramson tadi ya ini pemegang saham punya kepentingan atau ada yang punya kepentingan-kepentinganlah. Nah, tapi jangan jadi, ini sekarang permasalahannya harus ada solusi mana yang dibuang mana yang harus dibeli, mana yang mencari solusi supaya bebannya mungkin ringan. Nah, kalau FAME ini makin berat ya FAME-nya di-*drop* dulu, itu solusi. Kalau barang berat dibeli terus ya nggak solusi karena dia jual ke pasar luar harganya bagus, nggak usah ke Pertamina, hari ini harganya baik. Jadi, jangan udah rugi ditambahin rugi lagi gitu.

Saya minta apa solusi yang harus kita ambil di sini gitu loh, kalau beli datangkan *crude* BBM jadi lebih bagus ya ini aja yang dikerjain, toh ada untungnya. Kalau dijual ke industri, semua penambang di Indonesia ini sekarang impor BBM semua dan itulah penyuplainya yang besar-besar itu, kenapa nggak Pertamina aja kita tunjuk, gitu. Kan bisa menopang keberatan Pertamina ini, kan kita mau cari solusi di sini, bukan cari ribetnya gitu loh. Nah, FAME sekarang posisi harganya bagus biar aja dia ekspor, yang penting DMO untuk minyak gorengnya selesai. Saya sepakat di situ karena kita memikirkan rakyat ini, bukan mementingkan kepentingan seseorang atau *person-person* itu.

Gitu, terima kasih, Pimpinan.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Menambahkan, Pimpinan.

Mungkin pertanyaan ini menjadi simpel kalau B0 lebih mahal atau lebih murah kalau katakanlah B30 saat ini.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Selain harga yang perlu dipertimbangkan adalah *availability* dari solar itu sendiri, kalau B30 sekarang menjadi B0. Maka kita harus menutupnya dari impor Pak. Nah, impor sekarang solar itu memang lagi sulit. Kemarin kita cari di pasar aja untuk menambah *inventory* kita, pasokan solar ini lagi sulit karena itu tadi ternyata pasokan solar atau *gasoline* untuk kebutuhan apa namanya barat dan sebagainya itu 50% disuplai dari Rusia. Jadi, ketika Rusia kena sanksi, maka semua *supply* yang ada tergerus ke sana apalagi kemudian pasokan gasnya turun. Jadi, sekarang mungkin yang perlu dipertimbangkan selain harga adalah *availability* dari barangnya ini. Saya khawatir kalau B30 ini kita *drop* dapat barang untuk menutup yang 30%-nya hari ini agak sulit Pak. Kami kemarin mencari hanya dapat angkanya tuh sedikit sekali di pasar itu. Dengan harga yang tadi *crack spread*-nya tuh bisa sampai 51, 40. Jadi, mahal sekali Pak.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Oke, kalau dengan tetap B30 maka harus ada kebijakan DMO dengan DPO sekaligus, *domestic price obligation*.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Iya.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Saya kira itu ya jalan ke luarnya.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, itu suatu saat kita buat rapat seperti membela PLN ya Pertamina harus kita bela juga kan. PLN potensi kerugiannya 200 triliun hilang, terkompensasi oleh kebijakan itu Bu Dirut, 200 triliun diakui oleh dirutnya di sini karena kita juga udah hitung. Jadi, nanti kita buat sesi tersendiri, Pak Ketua Rapat sama Pak Ketua Komisi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ramson.

Saya kira DMO dan DPO itu bisa menyelesaikan berbagai masalah, termasuk minyak goreng karena saat ini harga CPO yang dijual kepada produsen minyak goreng itu dijualnya di harga ya harga pasaran Pak. Tidak ada tag harganya. Jadi, itu yang membuat kemudian kita sekarang di rumah kerupuk pun jarang Pak karena istri ngirit untuk goreng kerupuk.

Baik, Ibu Dirut sudah ya, terima kasih.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian.

Karena juga sudah melewati waktu dan kita sudah menambah banyak, menampung banyak masukan dari Ibu/Bapak sekalian termasuk dari Pak Dirjen, Ibu Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina. Saya akan membahas, kita akan memulai untuk membacakan kesimpulan rapat.

Baik.

Saya bacakan draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDMRI, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Selasa, 29 Maret 2022 :

1. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk menjaga pasokan BBM solar subsidi dan mendukung penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta kilo liter menjadi 17 juta kilo liter, serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kilo liter, menjadi. Oke jadi ditambahkan, serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kilo liter menjadi 600 ribu kilo liter.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, Bu, silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Saya sepakat dengan nomor satu ini tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga harus bisa salah satu tugas yang *explicitly* dari BPH Migas adalah menjamin distribusi ini. Nah, tentunya kita harus punya data detail menjadi tugas BPH Migas terkait konsumen yang berhak untuk solar bersubsidi ini. Kalau tidak ada data detail dari BPH Migas terkait dengan siapa yang berhak, tentu ini dinaikkan berapa pun kuota pasokan, kuota solar bersubsidi ini nggak akan cukup.

Nah, saya setuju dengan Pak Nasir tadi, BPH Migas ini memang harus, dulu kan kita sebelum pemilihan BPH Migas kita bersepakat. BPH Migas ini adalah menjadi dibentuk, filosofinya adalah menjadi Wakil DPR untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik di masyarakat. Jadi, laporannya selalu ada. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan tambahannya adalah bukan hanya penambahan kuota, tetapi juga untuk membuat secara detail tentang segmen konsumen yang berhak. Ya ditambahkan di situ mungkin Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nggak di butir kedua, itu ada soalnya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Mungkin bisa ditambahkan jadi kesimpulan kedua, kita setuju dengan penambahan kuota solar 2 juta kilo liter itu. Tapi di nomor 2 kita mendesak juga BPH Migas untuk mengeluarkan, dari sisi pemerintah mengeluarkan peraturan dan BPH Migas melakukan, membuat data terkait dengan segmen solar bersubsidi kepada yang berhak, seperti itulah kira-kira tolong di belakang.

KETUA RAPAT:

Punten, kalau nggak salah Bu Dirut tadi ada dalam presentasinya, bahwa ada sudah ada peraturan pemerintah ya atau Perpres 119 Tahun 2014 ya, yang masih membutuhkan aturan turunan kan untuk mendetailkan itu dan itu belum ada, dari apa ada permen-nya dalam hal ini Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Yang 119 Bu ya, ada revisinya Pak, revisi, perlu revisi.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Jadi, izin Pak. Jadi, memang aturan di lampiran perpres itu sedang kami usulkan untuk dilakukan revisi supaya lebih jelas, lebih *clear* begitu mengenai konsumen penggunaanya itu Pak. Kalau yang terkait dengan kesimpulan di atas Pak, kalau boleh mungkin itu dua hal yang, jangan disatukan ya Pak ya antara, Komisi VII mendesak BPH Migas untuk menjaga pasokan BBM solar subsidi. Kalau yang dimaksud Bu Andi tadi, dan menjaga supaya tepat sasaran barangkali itu lebih ini ya Pak ya.

Itu kemudian nanti mungkin butir keduanya saja yang mengenai masalah penambahan kuota itu, Pak. Jadi, itu kan karena kan 2 hal yang berbeda kalau menurut saya, kalau yang pertama itu kita harusnya menjaga dengan kuota yang ada itu tetap terjamin kan gitu itu kan dan tepat sasaran.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jangan dihapus, udah benar itu, menjaga pasokan dan distribusi BBM solar subsidi tepat sasaran. Singkat aja udah, mantap, Komisi VII mendukung penambahan, *oke*.

KETUA RAPAT:

Setuju ya yang pertama ya?.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Saya setuju tapi saya minta nanti di rapat dengan BPH Migas secara detail disampaikan ke Komisi VII, segmen-segmennya tadi Pak Nasril Bahar juga, ini bagian dari pengawasan kami kepada BPH Migas juga ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Maksudnya, mohon izin.

Nanti BPH ini setiap bulan memberikan laporan ke Komisi VII, nanti poinnya terserah.

KETUA RAPAT:

Ada nanti di bawah, nanti.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, mungkin catatan aja poin 1 setuju. Tapi untuk yang nanti urusan dengan revisi perpres itu, saya ingin kasih masukan aja berkaitan dengan akses terhadap solar subsidi ini, untuk kami masyarakat nelayan yang ada di Maluku contohnya. Kapal 30 GT itu kan masih dapat subsidi, di atas 30 GT itu tidak dapat subsidi. Begitu kapal-kapal 30 GT masuk, maka selesailah seluruh kapal-kapal apa namanya pancing tonda dan yang lain yang di bawah 30 GT. Jadi, mestinya ini juga dibikin apa namanya aturan tersendiri juga gitu loh. Jadi, melindungi nelayan-nelayan kecil yang super mikro ini, kalau nggak nelayan-nelayan ini bisa tunggu berhari-hari bolak-balik dengan gen-gennya ngambil izin di DKP, di Dinas KP, izin di Deperindag, uang yang dikeluarkan bolak-balik untuk izin itu jauh lebih besar dari harga 1 gen solar.

Jadi, buat saya, kita ngurus mereka ini juga bertingkat kalau dipukul rata kayak gini habis setiap kali stok masuk, misalnya kayak di Benjina setiap kali stok masuk selesai begitu kapal-kapal besar ini masuk, masyarakat nelayan udah nggak dapet apa-apa.

Saya pikir ini kita selamatkan nelayan-nelayan kecil gitu. Jadi, ini masukan aja ya buat Pimpinan, anggota dan terutama Bapak-bapak yang nanti akan mengurus perbaikan perpres ini.

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Izin ditanggapi, memang kami sudah melakukan pembahasan dengan KKP Bu. Rencananya akan kami bagi dua gitu sampai dengan 10, kemudian 10 sampai 30, begitu nanti ada 2 *cluster* begitu Bu.

KETUA RAPAT:

Baik, *oke*.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin sedikit, Pimpinan, Rico, Pimpinan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Ini drat pertama ini kok ini jadinya ini ke Kepala BPH Migas soal menjaga pasokan, regulasinya yang BPH Migas.

KETUA RAPAT:

..(suara tidak jelas)..tiganya aja kalau begitu.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Bukan, harus merubah regulasinya itu, jadi kan bidangnya di situ seperti tadi waktu kita diskusi-diskusi bahwa per kabupaten, per apa itu yang dibuat oleh BPH Migas. Itu harus diubah supaya operasinya Pertamina lancar. Jadi kalau BPH Migas mana bisa melakukan ini pasokan, dia kan hanya regulasi aja nih BPH Migas.

KETUA RAPAT:

Ya jadi ya karena itu, sekarang kan ini *effort*-nya harus dilaksanakan secara kolektif oleh 3 kelembagaan ini Pak Dirjen, BPH Migas dan Pertamina. Jadi, kesimpulan nomor 1 kita tambahkan menjadi, Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama Pertamina Persero untuk menjaga pasokan dan distribusi agar solar subsidi dapat, agar tepat sasaran. Termasuk di dalamnya adalah yang disampaikan itu, fleksibilitas agar bisa terjadi pengisian terhadap daerah-daerah yang memang membutuhkan, apa namanya, solar subsidi dari tempat-tempat yang memang surplus solar subsidi.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau ini Pak Ketua, tepat asal yang bertiga tahu maksudnya tersirat. Artinya ada ada perubahan regulasi operasional dibuat oleh BPH Migas dan Dirjen Migas, sehingga Pertamina fleksibel gitu, itu kan Pak Ketua, tersiratnya itu penting soalnya. Artinya dibalik formalnya itu kan selalu ada tersirat ya itu udah cukup jelas.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Ketua, Pimpinan.

Ini kan saya kira soal distribusi yang disubsidi ini kan bukan soal BBM, tapi soal gas juga kan jadi persoalan. Di mana gas yang 3 kilo itu juga penyebarannya kan tidak merata, ada daerah yang numpuk, ada yang tidak. Katakanlah kayak Kalimantan Tengah itu masih banyak daerah yang belum masuk diversifikasi minyak tanah ke gas, ada masih banyak. Nah, oleh karena itu, mungkin sedangkan kuotanya masih banyak, kenapa tidak terserap? Oleh karena penyebarannya tidak merata.

Saya kira perlu juga dicantumkan dalam kesimpulan terkait dengan gas ini, bukan hanya BBM saja tapi gas juga, BBM dan solar dan gas.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Yang lebih mendesak nih *actual* BBM, BBM aja dulu kita buat Pak Ketua, supaya fokus ke situ dulu sekarang ini, nanti baru belakangan kita ini lagi, khusus.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Saya kira cantolan kesimpulan kan saya nggak ada masalah. Persoalan realisasinya kapan itu, silakan teknis, tapi dicantolkan ke kesimpulan penting untuk distribusi yang kita lihat hari ini juga tidak merata soal gas ini.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kira kita tampilkan saja di situ dan gas subsidi, solar dan gas subsidi.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Ini maksudnya LPG atau gas Pak, LPG maksudnya toh, LPG maksudnya Pak ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

LPG 3 kg, biar lebih tepat gitu loh.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tapi Pak Ketua, keputusan nomor 1 kalau LPG begitu. Itu bisa implikasinya lebih luas, akhirnya apa? Nanti di daftar aja jadinya semua konsumen LPG. Jadi, satu-satu kita buat, nanti soal pemerataan itu ya dikasih info aja di mana yang ini dulu macet, langsung didistribusikan, kalau BBM ini kan udah meluas nih.

Itu maksud saya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saya kira betul Pak Ramson, tetapi saya kira karena kita membahas ini secara menyeluruh bahwa ini juga mencakup nantinya akan pasti mencakup LPG subsidi juga karena saat ini juga distribusinya saat ini belum merata. Saya usulkan agar kita tetap masukkan dalam kesimpulan ini, tanpa mengurangi makna dari mendesaknya penanganan terhadap BBM solar. Bisa disetujui ya Ibu/Bapak ya? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

2. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk mendukung penambahan kuota solar subsidi sebesar 2 juta kilo liter menjadi 17 juta kilo liter, serta penambahan kuota minyak tanah sebesar 100 ribu kilo liter menjadi 600 ribu kilo liter.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Izin, Pimpinan.

Itu bentuknya apa gitu kalau dari kami?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, poin yang 2 ini mungkin karena ini kan bukan gawainya Kepala BPH Migas. Ini sebenarnya urusannya kita dengan Menteri ESDM, jadi bagian iya. Jadi, kalau bahasa pemerintah juga maksudnya mereka yang di sini, ini bukan urusannya dengan subsidi, c.q. kuota penambahan dari sisi kewenangan, Pak Ketua.

Jadi, kalau saya boleh usul, Komisi VII DPRRI bersama apa namanya PT, dirut apa dan seterusnya Pak Dirjen dan seterusnya ini, bersepakat untuk apa ya, menambahkan apa, dan akan dibawa di dalam rapat pembahasan selanjutnya dengan Menteri ESDM. Ini kan gawai Komisi VII nanti baru ke Banggar itu lanjutannya. Jadi, supaya nggak salah dari sisi forum ini gitu loh, untuk dibahas lebih lanjut dengan menteri, Menteri ESDM.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi, Pak Ketua.

Ini soal nomor 2 ini saya pikir jangan kita paksa Pertamina melebihi wewenang mereka. Ini urusan pemerintah. Nggak bisa Pertamina mengatur-pemegang saham, kita mesti tahu juga posisi kalau kita lagi posisi di Dirut Pertamina. Ini urusan kita dengan pemerintah di APBN ini, APBN perubahan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Atau mungkin bisa kita ganti formulasinya, setelah mendapatkan masukan terkait kondisi lapangan pasca kenaikan harga *crude* hari ini, Komisi VII memahami kondisi yang ada dan ya.

KETUA RAPAT:

Jadi Komisi VII DPRRI sepakat untuk melakukan penambahan kuota solar subsidi dan seterusnya dan selanjutnya akan diagendakan pembahasan dengan Menteri ESDM.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi, ada dasarnya Pak, Komisi VII sepakat untuk menaikkan ini setelah mendengar masukan dari a, b, c untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut dengan Menteri ESDM titik, udah. Jadi, udah *clear* nih kan, ini udah urusannya kita nanti dengan Menteri setelah mendengar, mendapatkan semua masukan dari semua pihak terkait. Jadi, Komisi VII DPRRI sepakat untuk menambahkan, sepakat untuk melakukan penambahan, terus.... menjadi 600 ini, ini, setelah, kondisi riil di lapangan atas masukan dari PT Pertamina atau dari Dirut PT Pertamina, Dirjen Migas, Kepala BPH Migas untuk diagendakan dalam pembahasan dengan Menteri ESDM gitu loh.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, sedikit.

Kalau dengan Dirjen Migas kita sepakat, tepat, kalau BPH Migas urusan kuota operasional itu, bukan kuota politik di APBN. Jadi, cukup dengan Dirjen Migas karena nanti akan kita lanjutkan di raker membuat kesepakatan dengan bosnya Pak Dirjen yaitu Menteri ESDM, jadi dengan Dirjen Migas aja. Jadi, sepakat dengan Dirjen Migas, itu bisa nanti kita baru sepakat dengan Menteri ESDM di raker karena ini kan biarpun sama-sama di depan, beda nih pemerintah dengan Dirut Pertamina beda, BPH Migas hanya urusan-urusan kuota operasional nih harus dilihat bedanya. Jadi, kalau dengan Dirjen Migas untuk penambahan kuota itu dan seterusnya itu bisa, nah itu aja.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Jadi, saya kira kan begini, yang sepakat kan Komisi VII ini. Komisi VII aja yang sepakat setelah mendengarkan paparan dari Pertamina, dari BPH Migas, dasar itu lalu Komisi VII sepakat nih perlu kita menaikkan kuota, tapi akan dibicarakan dengan Kementerian ESDM. Jadi, kesepakatan ini bukan kesepakatan kita dengan BPH Migas, tapi kita aja yang sepakat ini tetapi atas masukan mereka. Itu dasar yang kita sepakati itu adalah masukan mereka tadi, dicantumkan saja saya kira itu, kira-kira begitu alur berfikirnya Bu Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kan namanya masukan, Pak Dirjen mungkin kan nggak tahu situasi paling detail di lapangan, ada terjadi kenaikan constantin 10% dari BPH, dari

Pertamina misalnya retail-retailnya ini tambah banyak, BBM satu harga dan seterusnya-seterusnya, sementara kuota tidak bertambah. Jadi, semua masukan ini kita masukkan jadi bahan gitu untuk dibicarakan lebih lanjut dengan menteri. Jadi saya kira ini udah *firm* kok, udah *oke*, setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

3. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDMRI, Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina Persero untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan melakukan penindakan tegas atas penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar.

Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

4. Komisi VII DPRRI mendesak pemerintah agar kompensasi kepada PT Pertamina Persero yang bernilai sekitar 100 triliun dapat segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas di Pertamina Persero yang dapat mengganggu penyaluran BBM nasional, dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM secara nasional.

Setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI mendukung perubahan komposisi pemberian BBM subsidi dan kompensasi dengan meningkatkan porsi BBM subsidi yang lebih besar.

Subsidi BBM ya, subsidi dan kompensasi BBM. Jadi, BBM di belakang, bukan Pak, di atasnya jadi BBM, ah itu dia. Subsidi dengan meningkatkan porsi subsidi BBM yang lebih besar, *oke*. Bisa disetujui ya? Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

6. Komisi VII DPRRI mendesak Dirjen Migas Kementerian ESDMRI untuk segera menyiapkan *roadmap* dan membangun infrastruktur *Strategic Petroleum Reserves* (SPR) guna menciptakan cadangan BBM nasional dalam menunjang ketahanan energi nasional.

Prof, bagaimana, Prof?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Maksudnya membangun apa ya.

KETUA RAPAT:

Membangun, maksudnya kita harus memiliki infrastruktur itu Pak, menyiapkan *roadmap* dan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Kalau membangun kan nggak, menyiapkan bisa, menyiapkan *roadmap* dan infrastruktur, desain ya maksudnya perencanaan bisa Pak, tapi kalau membangunnya.

KETUA RAPAT:

Iya, *oke*. Menyiapkan *roadmap* ya dan infrastruktur, *oke* setuju ya Prof ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

7. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Persero menyiapkan analisa sensitivitas kenaikan harga BBM terhadap beban subsidi guna menyiapkan strategi-strategi dalam mengantisipasi dampak fluktuasi harga minyak dunia, iya migas dunia.

Saya kira ini penting bagi kita juga untuk melakukan analisa yang kemudian akan menjadi basis perhitungan kita untuk disampaikan nanti dalam pembahasan dengan Banggar ke depan, setuju Ibu/Bapak ya?

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin, Pimpinan.

Kalau ada begini pembahasan harus ada *time frame*-nya. Jadi, kita juga misalnya ini kan mendesak untuk segera menyiapkan, *oke roadmap*-nya yang nomor 7 itu, untuk menyiapkan analisa sensitivitas. Ini kapan kita mendapatkan analisa ini gitu loh. Jadi jangan sampai kita membuat suatu kesimpulan. Saya nih paling selalu melihat kesimpulan-kesimpulan rapat sebelumnya dan memastikan bahwa apa yang kita simpulkan itu dikerjakan gitu loh. Jadi, kalau 7, kita harus minta kapan harus diberikan analisisnya ini, misalnya paling lambat 3 minggu atau 2 minggu setelah ini. Jadi, kita punya kepastian, jadi kita bisa menjawab juga ke ini, selambat-lambatnya kapan gitu loh Pimpinan.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Izin Pimpinan, kalau masalah harga tidak termasuk di tusi kami, di Ditjen Migas biasanya untuk harga, untuk analisa harga.

KETUA RAPAT:

Prof, bagaimana Prof kira-kira?

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

2 minggu bisa, Pak.

KETUA RAPAT:

2 minggu ya, *oke* selambat-lambatnya 2 minggu. Baik, jadi selambat-lambatnya, ada penambahan selambat-lambatnya 13 April 2022 dan disampaikan kepada Komisi VII DPRRI, setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

8. Komisi VII DPRRI mendesak Kepala BPH Migas untuk membuat laporan terkait pengawasan, pelaporan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi untuk disampaikan kepada Komisi VII DPRRI setiap bulannya.

Bu Ketua, Ibu Kepala, setuju ya? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

9. Komisi VII DPRRI meminta Dirjen Migas Kementerian ESDMRI, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Persero untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan paling lambat tanggal 5 April 2022.

Baik, demikian kesimpulan telah eh setuju?

(RAPAT : SETUJU)

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Satu-satu dulu dibaca dengan pihak ini.

KETUA RAPAT:

Udah diketok semua Pak.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Nggak tadi nomor 1, beliau ada perubahan sedikit, coba nomor 1. Jadi, proporsional daerah maksudnya. Nggak, karena begini, kalau ini implikasinya mereka mau melaksanakan keputusan itu harus didata setiap orang yang mendapat ini, itu komplikasinya harus didata. Memang itu dulu perdebatan di

sini, memang maunya saya dulu yang begitu, coba di, padahal beliau, proporsional daerah coba.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Mungkin intinya kan, tafsirnya begini, maksud saya kan LPG 3 kilo ini ya distribusinya, kuotanya per daerah itu kan tidak proporsional. Katakanlah contoh Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit misalnya, di situ dari 19 kabupaten kota, dari kecamatan itu yang minyak tanah juga sudah tidak masuk lagi tetapi diversifikasi dari minyak ke gas kan baru separuhnya yang dikasih gitu, sedangkan yang sisa kecamatan yang lainnya di-cover oleh kecamatan yang baru itu.

Jadi, oleh karena itu, pembagian distribusi kuota, distribusi kuota dari LPG 3 kilo itu agar proporsional merata di seluruh, kira-kira itu.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Mungkin menambahkan, idealnya yang dapat gas 3 kg itu kan orang miskin. Artinya di mana di situ banyaknya orang miskin secara proporsional yang terbesar di situ, begitu memang.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi, kalau begini Pak Ketua, iya ini Pertamina harus data semua orang-orang tuh. Maksudnya beliau proposional daerah proporsional, kalau kalau ini bisa masyarakat ini lagi ini yang tadinya udah dapat jadi nggak dapat ya, harus hati-hati juga membuat keputusannya karena dulu ini perdebatan periode yang lalu, awal-awal periode lalu karena kita mau ingin sistemnya didata semua. Kalau ini maksudnya beliau per daerah itu proporsional, jangan ada yang apa namanya banyak tapi ada yang dikit. Jadi subsidi dengan kuota daerah yang proporsional gitu.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Saya kira nggak masalah ini, soalnya tepat sasaran kan selalu kita menemukan distribusi itu kan, subsidi itu harus tepat sasaran itu sudah suatu kesimpulanlah, apa pun namanya, kita yang namanya di sini kita harus tepat sasaran itu sudah biasa. Jadi, saya kira nggak ada masalah ini, tinggal nanti penjabarannya seperti apa kan bisa diimplementasikan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, ini konsekuensi keputusan, Pertamina harus mendata ini semua yang berhak mendapat ini apa namanya subsidi, itu harus terdata dulu yang mau dibuat sistemnya oleh Dirjen Migas yang lama sama waktu itu Direktur Pemasarannya Pak Bambang, tapi akhirnya gagal.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya betul, izin Pimpinan.

Jadi, kalau LPG itu Pak Ramson, setiap orang yang mendapat, setiap pembeli LPG 3 kilo itu harus ada KTP-nya, harus, bukan dijual di pasar bebas gitu nggak ya dan itu masuk kategori masyarakat penerima manfaat, nanti ada BPK yang akan mengaudit. Apakah itu masyarakat penerima manfaat atau bukan, kalau pengecer atau agen ini atau pangkalan ini yang menjual kepada masyarakat yang tidak menerima manfaat, maka akan didenda perusahaan itu, berapa kali lipat harus bayar balik ah itu.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pangkalannya didenda ya.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Iya, perusahaannya, agennya. Tapi ingin saya tambahkan di sini Ketua, poin 1, bukan hanya LPG aja tadi kita di ruang rapat pimpinan. Kita memutuskan bahwa subsidi solar ini jangan hanya per SPBU, juga harus per daerah gitu loh. Sehingga, proporsional tadi tidak terjadi kelangkaan di setiap jalur-jalur Trans Sumatera atau Trans Jawa karena kalau kita pakai subsidi pakai SPBU. SPBU-SPBU yang di kolong-kolong itu diambil aja minyaknya sama industri, orang tambang, orang kebun dari mana minyaknya iya kan, dengan harga yang subsidi kan tidak tepat sasaran.

Jadi, kita kembalikan lagi kepada BPH ya Bu ya harus dikembalikan ke per daerah, per kabupaten seperti itu, udah *clear* cocok ini, cuman tinggal ditambahkan aja proporsional daerah, soal subsidi bukan hanya LPG tapi solar subsidi juga.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Kasih tambah aja.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Perdebatan kita informal kan di situ proporsional daerah.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, tambahkan saja agar tepat sasaran antara lain proposional daerah, tepat sasaran itu kan termasuk proporsional daerah. Contohnya misalnya ketentuan dari BPH Migas solar berapa, nah ini harus dievaluasi terus cocok nggak kuota untuk Sumatera Selatan seperti sekian gitu misalnya, cocok nggak untuk Riau ya seperti itu, Riau, Riau.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Usul Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Dengan memperhatikan proporsional daerah.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Proporsional daerah.

KETUA RAPAT:

Sudah ya, memperhatikan proporsional kebutuhan.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Atau dengan kebutuhan daerah yang proposional gitu aja deh, dengan bukan mempertimbangkan lagi, dengan kebutuhan daerah yang proporsional.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Memperhatikan kebutuhan daerah secara proporsional, secara proporsional udah.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan tadi lupa saya, tadi udah disampaikan Pak Nasril soal *illegal drilling*. Jadi di Sumatera Selatan sudah ada operasi Pak ya pengoplosan BBM subsidi, pencurian *crude oil*, ada lagi *illegal drilling* kedua dibahas nih. Dan kita sudah melaksanakan rapat, Pak ya untuk menindaklanjuti persoalan *illegal drilling*. Nah tolong juga dalam kesimpulan ini nanti Komisi VII ya dengan Dirjen Migas akan mengundang kepala daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten yang wilayahnya masuk dalam kategori *illegal drilling* itu karena produksi *illegal drilling* ini bisa mencapai 500 sampai dengan 1.000 barel per hari, 5.000 sampai 8.000 barel per hari ya Pak Dirjen ya.

Ini *illegal drilling* ini Pak di samping merusak lingkungan hidup juga mengancam keselamatan pekerja karena tidak melakukan penambangan ini berdasarkan standar dari keamanan dari pihak Pertamina, seperti itu. Nah, tolong dimasukkan Pimpinan, tadi udah tindak lanjut dari hasil kunjungan ya, tindak lanjut ini Pimpinan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan, mungkin gini aja singkatnya kawasan konsesi yang dilakukan *illegal drilling* ini segera untuk diserahkan oleh Dirjen Migas atau Kementerian ESDM menyerahkan kawasan konsesi yang melakukan pencurian *illegal drilling* untuk diserahkan segera ke Pertamina.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Begini ya, menurut saya ini penting, penting sekali tapi ini ada pembahasan lain yang tidak di sini menurut saya kesimpulannya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak, tadi kan ini masalahnya kan kita kesulitan BBM sekarang, kan ini penambahan *crude*, Ketua.

F-P.NASDEM (SUGENG SUPARWOTO/KETUA KOMISI VII DPRRI):

Konteksnya tidak di sini ini.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Menteri ESDM aja deh nanti raker.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ini kan masalahnya kan kelangkaan BBM sekarang. Maksudnya ini nggak, segera menyerahkan konsesi itu saja kesimpulannya.

KETUA RAPAT:

Saya setuju karena ini fokus kita kan ada kelangkaan BBM solar, dan bagaimana penanganannya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Catatan ajalah Ketua, supaya jangan lupa.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

TA catat, Pak Ketua maaf.

Nanti di Raker dengan Menteri ESDM ini masuk agendanya, itu lebih tinggi lagi keputusannya.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu sudah seperti ini ya, setuju ya *oke*.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Ibu/Bapak sekalian.

Terima kasih atas masukannya.

Kami persilakan Pak Dirjen Migas, Ibu Kepala BPH dan Ibu Direktur Utama Pertamina untuk memberikan sambutan penutup sebelum kita akhiri agenda kita.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM RI (Ir. TUTUKA ARIADJI, M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi VII, Ketua dan Anggota Komisi VII.

Terima kasih atas segala masukannya dan kami akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang tertulis dalam notulen rapat tadi.

Terima kasih.

KEPALA BPH MIGAS (ERIKA RETNOWATI):

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII.

Terima kasih atas semua saran, masukan untuk perbaikan kami ke depan dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas kami dalam melakukan pengendalian dan juga pengawasan atas penyediaan dan distribusi BBM.

Terima kasih.

DIRUT PT PERTAMINA PERSERO (NICKE WIDYAWATI):

Ya baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Pimpinan Komisi VII DPR beserta seluruh anggota.

Terima kasih tadi beberapa masukan dan nanti jawaban tertulis untuk yang belum sempat saya jawab tadi akan kami sampaikan secara tertulis. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih atas *support*-nya yang luar biasa kepada Pertamina dalam memastikan nantinya untuk mendistribusikan BBM subsidi dan juga LPG..(*suara tidak jelas*)...Semoga apa yang kita lakukan ini, upaya kita ini mendapat kemudahan dari Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih atas sambutan penutup.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu/Bapak Anggota Komisi VII yang hadir untuk memberikan pandangan dan masukan-masukannya.

Dan mengucapkan syukur *alhamdulillah* bersama ini Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina Persero, kami nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.50 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002